

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI *CORPORATE RESPONSIBILITY* (CSR)
PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA (PT.KSK)
DI KECAMATAN BALAI RIAM**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SURDANI

NIM. 017985492

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRACT

Implementation of *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Kalimantan Sawit Kusuma (PT.KSK) in Balai Riam District

Surdani
Universitas Terbuka
surdanipatih (@) gmail.com

Keywords: Implementation, CSR, Community

PT. Kalimantan Sawit Kusuma role as an oil palm plantation company with a large scale production capacity of more than 30 tons / TBS / hour, has a corporate social responsibility (CSR) that hares implemented as well as possible, especially with the CSR target communities and the natural environment in Balai Riam District, Sukamara Regency. CSR implementation by PT Kalimantan Sawit Kusuma with target communities and the natural environment have so far been implemented as well as possible and full responsibility, with various forms of real contribution to the benefit either directly or indirectly.

The extent to which the implementation of the CSR implementation in the community has been the target of this research is aimed at: 1. To identify and analyze how the implementation of CSR in PT Kalimantan Sawit Kusuma in District Hall cascade. 2. To identify and analyze the factors that hinder the implementation of CSR in PT Kalimantan Sawit Kusuma in Balai Riam District.

Based on the research that has been done, this research produced the following: Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs conducted by PT Kalimantan Sawit Kusuma in Balai Riam District with a few things that still need improvement in the planning and implementation are: a. Communication intensity terms CSR programs conducted socialization and improved, in order to get a good CSR program socialization clarity about the program mater and the place and time of the, b. CSR programming bureaucratic structure is quite well organized and integrated enough, in order to achieve the task sharing mechanism in the implementation of the program has been established through a standard operating procedure (SOP), c. Resources as well as the role of ability and availability of human resources to implement CSR program with limitations may have run pretty well, d. Disposition on the basis of consistency in terms of the implementation of CSR programs related to the consistency of its implementation based on the CSR Standard Procedure Number: PBD/KSK/03 to maintain the consistency of good instructional administrative, operational procedures, operational guidelines that have been set.

CSR programs PT Kalimantan Sawit Kusuma in Balai Riam District impact on three aspects: economic, social and environmental factors that a barrier is: a. Communication factors include a lack of communication between the company and community, not maximal dissemination of CSR programs, the lack of media socialization of CSR programs and people's lack of understanding of CSR programs, b. Resource factors include: the availability of human resources, c. Bureaucratic Structure factors, include: changes in leadership, lack of monitoring and evaluation, and the lack of coordination between the existing bureaucratic structures in the government and d. disposition factors include; there is still no clear rules on the implementation of CSR among companies.

ABSTRAKSI

Implementasi *corporate social responsibility* (CSR) PT.Kalimantan Sawit Kusuma (PT..KSK) Di Kecamatan Balai Riam

Surdani

Universitas Terbuka

surdanipatih@gmail.com

Kata Kunci : Implementasi, CSR, Masyarakat

PT. Kalimantan Sawit Kusuma berperan sebagai sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar dengan kapasitas produksi lebih dari 30 ton/TBS/jam, mempunyai kewajiban sosial perusahaan (CSR) yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan sasaran CSR yaitu masyarakat dan lingkungan alam sekitar di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara. Pelaksanaan CSR oleh PT.Kalimantan Sawit Kusuma dengan sasaran masyarakat dan lingkungan alam sekitar sejauh ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab, dengan berbagai bentuk kontribusi nyata yang memberikan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung.

Sejauh mana implementasi pelaksanaan CSR itu di masyarakat selama ini menjadi sasaran dalam penelitian ini yang bertujuan adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi pelaksanaan CSR di Perkebunan Sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat implementasi pelaksanaan CSR di Perkebunan Sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini menghasilkan sebagai berikut: Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Program CSR yang dilaksanakan oleh PT.Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam dengan beberapa hal yang masih perlu peningkatan dalam perencanaan hingga pelaksanaannya adalah : a. Komunikasi secara intensitas sosialisasi program CSR terus dilakukan dan di tingkatkan, guna mendapat kejelasan sosialisasi program CSR baik tentang materi program maupun tempat dan waktu pelaksanaan b. Struktur birokrasi pemrograman pelaksanaan CSR sudah cukup tertata baik dan sudah cukup terintegrasi, dalam rangka pencapaian mekanisme pembagian tugas dalam implementasi program sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP), c. Sumber daya peran serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakannya program CSR dengan keterbatasannya bisa telah berjalan cukup baik, d. Disposisi tentang konsistensi landasan pelaksanaan program CSR dalam hal konsistensi terkait pelaksanaannya berpedoman pada Prosedur Standar CSR Nomor : PBD/KSK/03 untuk menjaga konsistensi instruksional baik administrasi, prosedur oprasional, petunjuk oprasional yang telah ditetapkan.

Program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam memberikan dampak pada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, beberapa faktor yang menjadi penghambat adalah : a. Faktor komunikasi meliputi kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat, belum maksimalnya sosialisasi program CSR, kurangnya media sosialisasi tentang program CSR dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program CSR, b. Faktor Sumber daya, meliputi : ketersediaan sumber daya manusia, c. Faktor Struktur Birokrasi, meliputi; pergantian kepemimpinan, kurangnya monitoring dan evaluasi, dan kurangnya koordinasi antara struktur birokrasi yang ada di jajaran pemerintahan dan d. faktor disposisi meliputi ; masih belum ada peraturan yang jelas tentang pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

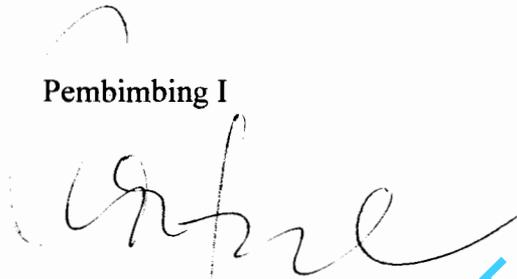
JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA (PT. KSK) DI
KECAMATAN BALAI RIAM

NAMA : SURDANI

NIM : 017985492

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Pembimbing I



Dr. Idha Hayu Dwi Mawanti, MM
NIDN. 19086704

Pembimbing II



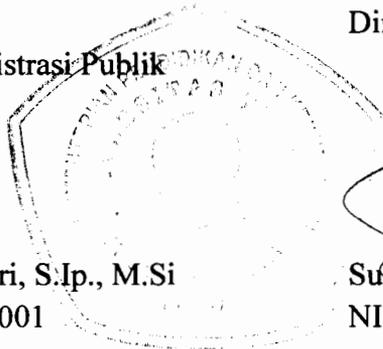
Dr. Kuwing Baboe, M.Si
NIP. 19530603 197802 2 001

Mengetahui,

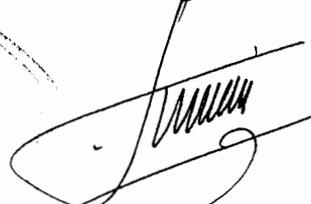
Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001



Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : SURDANI
 NIM : 017985492
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90
 JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA (PT. KSK) DI KECAMATAN BALAI RIAM

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Juli 2013
 Waktu : Pukul 12.00 – 14.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Moh. Yunus, S.S., M.A

:

.....

Penguji Ahli
 Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja M.Si

:

.....

Pembimbing I
 Dr. Idha Hayu Dwi Mawanti, MM

:

.....

Pembimbing II
 Dr. Kuwing Baboe, M.Si

:

.....

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar

Palangka Raya, Mei 2013



SURDANI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Manusia harus bertanggungjawab, bijaksana, bermanfaat, dan teladan bagi sesama, (Lambang Kebaringan Kuyah, Bukit Ketampuhan Ansap)”

“COGITO ERGO SUM, yang artinya aku berfikir, oleh sebab itu aku ada”

UNIVERSITAS TERBUKA

Tesis ini dipersembahkan kepada :

❖ *Almamaner tercinta Universitas Terbuka*

❖ *Orang tua tercinta yang tiada henti untuk memberikan dukungan dan semangat serta Do'a untuk keberhasilan dan kesuksesan ku*

❖ *Istri dan anak-anak ku tercinta*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya, sehingga penulis diberi kekuatan, kemudahan, kemampuan dan kesempatan menyelesaikan penelitian dan menyusun serta menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini sesuai jadwal yang ditetapkan dengan baik.

TAPM ini mengangkat judul “IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA (PT.KSK) DI KECAMATAN BALAI RIAM”.

Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan tentunya di dalam penulisan dan penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang banyak memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingannya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Prof, Dr. Holten S.Bahat
2. Kepala UPBJJ-UT Palangka raya selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II (Dr. Ida Hayu Dwi Mawanti, MM dan Dr. Kuwing Baboe, M.Si) yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Lurah beserta aparaturnya yang telah bersedia menerima penulis untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang penulis perlukan guna penyusunan Tesis sehingga dapat terwujud sesuai harapan penulis.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moril, khususnya kepada anak-anak dan istri yang selalu memberi dorongan semangat.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata “sempurna” oleh karenanya adanya kritik saran dan masukan yang membangun nantinya terhadap tesis ini sangat di harapkan.

Harapan dan doa penulis semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya. Atas semua bantuan penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua budinya.

Palangka Raya, Juni 2013

Penulis,

SURDANI

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Hal .
Abstract	i
Lembaran Persetujuan	iii
Lembaran Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel dan Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
B. Teori Implementasi.....	15
C. Determinan atau Faktor-Faktor yang mempengaruhi	18
D. <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR)	24
E. Strategi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	28
F. Kerangka Berpikir	32

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
B. Teknik Penentuan Informen	37
C. Instrument Penelitian.....	38
D. Fokus Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Profil PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit	44
B. Gambaran Umum Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)...	51
C. Penyajian Data dan Hasil Penelitian.....	61
D. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Rian	86
BAB V KESIMPULAN	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL	HAL.
Tabel 3.1 Informan dan Informasi yang di gali	37
Tabel 4.1 Legalitas Usaha	44
Tabel 4.2 Informan Penelitian	61
Tabel 4.3 Jenis Kegiatan, Tatawaktu dan Alokasi biaya program CSR	68
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III	34
Gambar 3.1 Proses Analisis Data Kualitatif	42
Gambar 4.1 Struktur Oganisasi CSR PT. KSK	46
Gambar 4.2 PT. KSK	47
Gambar 4.3 Kegiatan pembangunan sumur bor desa Balai Riam	68
Gambar 4.4 Kegiatan pembangunan sumur bor desa air dua	69
Gambar 4.5 Kegiatan pembangunan pos yandu	69
Gambar 4.6 Kegiatan perbaikan jalan lingkungan	70
Gambar 4.7 Kegiatan sosial fasilitasi dewan Dayak	70
Gambar 4.8 Kegiatan sosial olahraga	71

DAFTAR LAMPIRAN

	HAL.
Pedoman Interview Guide	123

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

Implementation of *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Kalimantan Sawit Kusuma (PT.KSK) in Balai Riam District

Surdani
Universitas Terbuka
surdanipatih (@) gmail.com

Keywords: Implementation, CSR, Community

PT. Kalimantan Sawit Kusuma role as an oil palm plantation company with a large scale production capacity of more than 30 tons / TBS / hour, has a corporate social responsibility (CSR) that hares implemented as well as possible, especially with the CSR target communities and the natural environment in Balai Riam District, Sukamara Regency. CSR implementation by PT Kalimantan Sawit Kusuma with target communities and the natural environment have so far been implemented as well as possible and full responsibility, with various forms of real contribution to the benefit either directly or indirectly.

The extent to which the implementation of the CSR implementation in the community has been the target of this research is aimed at: 1. To identify and analyze how the implementation of CSR in PT Kalimantan Sawit Kusuma in District Hall cascade. 2. To identify and analyze the factors that hinder the implementation of CSR in PT Kalimantan Sawit Kusuma in Balai Riam District.

Based on the research that has been done, this research produced the following: Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs conducted by PT Kalimantan Sawit Kusuma in Balai Riam District with a few things that still need improvement in the planning and implementation are: a. Communication intensity terms CSR programs conducted socialization and improved, in order to get a good CSR program socialization clarity about the program mater and the place and time of the, b. CSR programming bureaucratic structure is quite well organized and integrated enough, in order to achieve the task sharing mechanism in the implementation of the program has been established through a standard operating procedure (SOP), c. Resources as well as the role of ability and availability of human resources to implement CSR program with limitations may have run pretty well, d. Disposition on the basis of consistency in terms of the implementation of CSR programs related to the consistency of its implementation based on the CSR Standard Procedure Number: PBD/KSK/03 to maintain the consistency of good instructional administrative, operational procedures, operational guidelines that have been set.

CSR programs PT Kalimantan Sawit Kusuma in Balai Riam District impact on three aspects: economic, social and environmental factors that a barrier is: a. Communication factors include a lack of communication between the company and community, not maximal dissemination of CSR programs, the lack of media socialization of CSR programs and people's lack of understanding of CSR programs, b. Resource factors include: the availability of human resources, c. Bureaucratic Structure factors, include: changes in leadership, lack of monitoring and evaluation, and the lack of coordination between the existing bureaucratic structures in the government and d. disposition factors include; there is still no clear rules on the implementation of CSR among companies.

ABSTRAKSI

Implementasi *corporate social responsibility* (CSR) PT.Kalimantan Sawit Kusuma (PT..KSK) Di Kecamatan Balai Riam

Surdani

Universitas Terbuka

surdanipatih@gmail.com

Kata Kunci : Implementasi, CSR, Masyarakat

PT. Kalimantan Sawit Kusuma berperan sebagai sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar dengan kapasitas produksi lebih dari 30 ton/TBS/jam, mempunyai kewajiban sosial perusahaan (CSR) yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan sasaran CSR yaitu masyarakat dan lingkungan alam sekitar di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara. Pelaksanaan CSR oleh PT.Kalimantan Sawit Kusuma dengan sasaran masyarakat dan lingkungan alam sekitar sejauh ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab, dengan berbagai bentuk kontribusi nyata yang memberikan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung.

Sejauh mana implementasi pelaksanaan CSR itu di masyarakat selama ini menjadi sasaran dalam penelitian ini yang bertujuan adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi pelaksanaan CSR di Perkebunan Sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat implementasi pelaksanaan CSR di Perkebunan Sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini menghasilkan sebagai berikut: Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Program CSR yang dilaksanakan oleh PT.Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam dengan beberapa hal yang masih perlu peningkatan dalam perencanaan hingga pelaksanaannya adalah : a. Komunikasi secara intensitas sosialisasi program CSR terus dilakukan dan di tingkatkan, guna mendapat kejelasan sosialisasi program CSR baik tentang materi program maupun tempat dan waktu pelaksanaan b. Struktur birokrasi pemrograman pelaksanaan CSR sudah cukup tertata baik dan sudah cukup terintegrasi, dalam rangka pencapaian mekanisme pembagian tugas dalam implementasi program sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP), c. Sumber daya peran serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakannya program CSR dengan keterbatasannya bisa telah berjalan cukup baik, d. Disposisi tentang konsistensi landasan pelaksanaan program CSR dalam hal konsistensi terkait pelaksanaannya berpedoman pada Prosedur Standar CSR Nomor : PBD/KSK/03 untuk menjaga konsistensi instruksional baik administrasi, prosedur oprasional, petunjuk oprasional yang telah ditetapkan.

Program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam memberikan dampak pada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, beberapa faktor yang menjadi penghambat adalah : a. Faktor komunikasi meliputi kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat, belum maksimalnya sosialisasi program CSR, kurangnya media sosialisasi tentang program CSR dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program CSR, b. Faktor Sumber daya, meliputi : ketersediaan sumber daya manusia, c. Faktor Struktur Birokrasi, meliputi; pergantian kepemimpinan, kurangnya monitoring dan evaluasi, dan kurangnya koordinasi antara struktur birokrasi yang ada di jajaran pemerintahan dan d. faktor disposisi meliputi ; masih belum ada peraturan yang jelas tentang pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

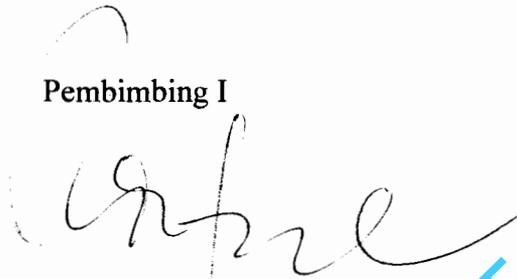
JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA (PT. KSK) DI
KECAMATAN BALAI RIAM

NAMA : SURDANI

NIM : 017985492

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Pembimbing I



Dr. Idha Hayu Dwi Mawanti, MM
NIDN. 19086704

Pembimbing II



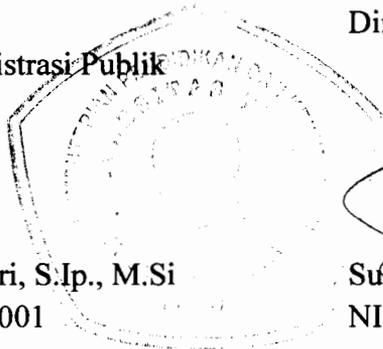
Dr. Kuwing Baboe, M.Si
NIP. 19530603 197802 2 001

Mengetahui,

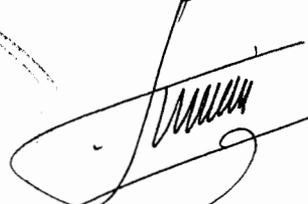
Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001



Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : SURDANI
 NIM : 017985492
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90
 JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA (PT. KSK) DI KECAMATAN BALAI RIAM

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Juli 2013
 Waktu : Pukul 12.00 – 14.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Moh. Yunus, S.S., M.A

:

.....

Penguji Ahli
 Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja M.Si

:

.....

Pembimbing I
 Dr. Idha Hayu Dwi Mawanti, MM

:

.....

Pembimbing II
 Dr. Kuwing Baboe, M.Si

:

.....

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar

Palangka Raya, Mei 2013



SURDANI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Manusia harus bertanggungjawab, bijaksana, bermanfaat, dan teladan bagi

sesama, (Lambang Kebaringan Kuyah, Bukit Ketampuhan Ansap)”

“COGITO ERGO SUM, yang artinya aku berfikir, oleh sebab itu aku ada”

UNIVERSITAS TERBUKA

Tesis ini dipersembahkan kepada :

❖ *Almamater tercinta Universitas Terbuka*

❖ *Orang tua tercinta yang tiada henti untuk memberikan*

dukungan dan semangat serta Do'a untuk keberhasilan dan

kesuksesan ku

❖ *Istri dan anak-anak ku tercinta*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya, sehingga penulis diberi kekuatan, kemudahan, kemampuan dan kesempatan menyelesaikan penelitian dan menyusun serta menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini sesuai jadwal yang ditetapkan dengan baik.

TAPM ini mengangkat judul “IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA (PT.KSK) DI KECAMATAN BALAI RIAM”.

Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan tentunya di dalam penulisan dan penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang banyak memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingannya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Prof, Dr. Holten S.Bahat
2. Kepala UPBJJ-UT Palangka raya selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II (Dr. Ida Hayu Dwi Mawanti, MM dan Dr. Kuwing Baboe, M.Si) yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Lurah beserta aparaturnya yang telah bersedia menerima penulis untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang penulis perlukan guna penyusunan Tesis sehingga dapat terwujud sesuai harapan penulis.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moril, khususnya kepada anak-anak dan istri yang selalu memberi dorongan semangat.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata “sempurna” oleh karenanya adanya kritik saran dan masukan yang membangun nantinya terhadap tesis ini sangat di harapkan.

Harapan dan doa penulis semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya. Atas semua bantuan penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua budinya.

Palangka Raya, Juni 2013

Penulis,

SURDANI

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Hal .
Abstract	i
Lembaran Persetujuan	iii
Lembaran Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel dan Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
B. Teori Implementasi.....	15
C. Determinan atau Faktor-Faktor yang mempengaruhi	18
D. <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR)	24
E. Strategi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	28
F. Kerangka Berpikir	32

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
B. Teknik Penentuan Informen	37
C. Instrument Penelitian.....	38
D. Fokus Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Profil PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit	44
B. Gambaran Umum Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)...	51
C. Penyajian Data dan Hasil Penelitian.....	61
D. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Rian	86
BAB V KESIMPULAN	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL	HAL.
Tabel 3.1 Informan dan Informasi yang di gali	37
Tabel 4.1 Legalitas Usaha	44
Tabel 4.2 Informan Penelitian	61
Tabel 4.3 Jenis Kegiatan, Tatawaktu dan Alokasi biaya program CSR	68
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III	34
Gambar 3.1 Proses Analisis Data Kualitatif	42
Gambar 4.1 Struktur Oganisasi CSR PT. KSK	46
Gambar 4.2 PT. KSK	47
Gambar 4.3 Kegiatan pembangunan sumur bor desa Balai Riam	68
Gambar 4.4 Kegiatan pembangunan sumur bor desa air dua	69
Gambar 4.5 Kegiatan pembangunan pos yandu	69
Gambar 4.6 Kegiatan perbaikan jalan lingkungan	70
Gambar 4.7 Kegiatan sosial fasilitasi dewan Dayak	70
Gambar 4.8 Kegiatan sosial olahraga	71

DAFTAR LAMPIRAN

	HAL.
Pedoman Interview Guide	123

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wacana penting dalam dunia bisnis sejak tahun 1970an. Dalam historisnya, praktik *Corporate Social Responsibility* yang disingkat CSR sendiri berawal dari tahap yang paling sederhana, yakni sifat kedermawanan para pemilik perusahaan. Pada saat ini CSR merupakan kegiatan penting bagi perusahaan-perusahaan modern, terutama dipelopori oleh MNCs (*multinational corporations*) (Idris, A.R., 2005, dalam Anto dan Astuti, 2008: 19). Terdapat berbagai definisi CSR, namun pada intinya menekankan bahwa tanggungjawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi (menciptakan *profit* demi kelangsungan usaha), melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengembangkan sebuah visi mengenai akuntabilitas bisnis (perusahaan) untuk berbagai pemangku kepentingan selain pemegang saham dan investor. Bidang-bidang utama yang menjadi perhatian adalah masalah pelestarian lingkungan dan kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya, baik pada waktu sekarang maupun sampai di masa depan.

Tanggungjawab dan kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR

bukanlah sekedar kegiatan amal, sehingga CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Secara garis besar, tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR pada hakekatnya merupakan bentuk kontribusi suatu perusahaan, dengan tujuan akhir menempatkan entitas bisnis untuk ikut serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) (Ambarini, 2010: 315). Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan ini sejatinya dipraktikkan di 3 (tiga) bidang (Guryy Kavei; dalam Ardana, 2008: 201) yaitu:

1. Di tempat kerja, seperti aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan kepemilikan saham;
2. Di komunitas, antara lain dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan sarana/prasarana fisik;
3. Di lingkungan, seperti upaya pelestarian lingkungan dan proses produksi yang ramah lingkungan.

Pro dan kontra mengenai kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan CSR semakin lama semakin berkurang. Pada saat sekarang ini, kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR ini semakin tinggi. Namun demikian, tidak semua perusahaan memahami konsep CSR sebagaimana mestinya. Bahkan bukan hanya

perusahaan saja yang kadang keliru memahami, Pemerintah pun, baik legislative maupun eksekutif, tak luput dari kritik dalam memahami konsep CSR ini. Salah satu kritik tersebut dilontarkan terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang konsep CSR.

Kritik terhadap konsep CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) disampaikan oleh peneliti Lingkar Studi CSR dalam seminar Transparansi Migas dan Pembangunan Berkelanjutan: Inovasi Blora dan Bojonegoro di Jakarta. Peneliti Lingkar Studi CSR mengatakan bahwa pendefinisian CSR di Indonesia dalam UUPT telah keliru dan ketinggalan zaman. Lebih lanjut dikemukakan, konsep CSR akan lebih terasa lebih luas dan terarah apabila ditinjau dari versi ISO 26000 (InfoCSR.net. 2011, <http://infocsr.net/read/2620/16/11/2011/csr-versi-undang-undang-no.40-tahun02007-dan-versi-iso-26000.html>, diakses tanggal 26 November 2012).

Kendala lain di samping pemahaman konsep CSR yang masih belum jelas adalah kesulitan dalam penentuan tolok ukur kinerja perusahaan dalam pelaksanaan CSR. Di beberapa negara, perusahaan dituntut untuk melaporkan pelaksanaan CSR, walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek tersebut. Sementara aspek lingkungan, apalagi aspek ekonomi, memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan. Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan metodologi evaluasi yang digunakan (walaupun dalam suatu industri yang sejenis). Banyak kritik mengatakan bahwa laporan ini

hanyalah sekadar "pemanis bibir" (suatu basa-basi), misalnya saja pada kasus laporan tahunan CSR dari perusahaan Enron dan juga perusahaan-perusahaan rokok (Wikipedia, 2012, http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, diakses tanggal 26 November 2012). Namun, dengan semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang sekarang terjadi adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya.

Sejarah adanya tanggungjawab sosial bagi perusahaan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya bukan hal yang baru. Dengan kata lain, CSR bukan merupakan isu baru sekalipun pada waktu itu istilah CSR belum dipakai. CSR sudah sama tuanya dengan perdagangan dan bisnis itu sendiri. Sejarah CSR sama panjangnya dengan sejarah perusahaan itu sendiri (Wiwoho, 2008: 110). Konsep adanya prinsip tanggungjawab sosial perusahaan ini muncul seiring dengan perkembangan perusahaan-perusahaan di dunia pada saat itu. Aturan-aturan mengenai perusahaan, cara memproduksi barang, pelayanan terhadap konsumen dan pemasaran sangat berkaitan dengan aturan-aturan yang berkenaan di bidang politik, sosial, dan militer (Charolinda, 2006: 88). Di Indonesia, penerapan tanggungjawab sosial perusahaan ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru, karena sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Akan tetapi secara konsep hal ini merupakan sesuatu yang baru.

Masyarakat dan dunia usaha mulai ramai membicarakan dan mengimplementasikan CSR setelah David C. Korten menuangkan pemikiran tentang betapa besarnya pengaruh korporasi dalam kehidupan sosial. Di sini terlihat betapa pentingnya tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungannya oleh korporasi, sehingga dengan CSR tersebut diharapkan akan dapat terjadi kehidupan yang saling bersinergi dan pemerataan kesejahteraan (Yuniarlin, 2008: 67).

Dalam menjalankan kegiatannya, sebuah perusahaan harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada 2 (dua) komponen yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Dua komponen ini dikenal dengan *shareholder* dan *stakeholder*. *Shareholder* adalah komponen yang terkait dengan internal perusahaan yang dalam hal ini dikenal sebagai para pemegang saham. Sedangkan yang dimaksud dengan *stakeholder* adalah semua pihak di luar para pemegang saham yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Peranan dari *stakeholder* ini sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Ada banyak nilai dan tatanan yang telah hidup di dalam masyarakat yang harus tetap dijaga dengan munculnya sebuah elemen baru di lingkungan mereka (Charolinda, 2006: 87). Implementasi CSR dianggap semakin penting untuk segera dilaksanakan dikarenakan proses globalisasi yang mendasarkan pada ekonomi pasar bebas, pada kenyataannya telah menimbulkan ketimpangan dunia (Yuniarlin, 2008: 67).

Konsep CSR terkait dengan filosofis mengenai kehidupan manusia dengan alam, dimana manusia berpandangan bahwa tujuan peradaban adalah untuk

mendominasi dan mengendalikan alam, lingkungan hidup, beserta makhluk hidup lainnya. Paradigma ini kemudian berubah menjadi bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang terintegrasi, oleh karenanya manusia memiliki kewajiban etis terhadap alam. Tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan manifestasi dari prinsip tersebut (Harnowo, 2007: 1). Konsep tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan juga tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak/orang lain. Ini menuntut agar perusahaan pun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya (Andjarwati dan Budiadi, 2008:2-3).

CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan faktor keuangan saja, melainkan juga harus berdasarkan pada konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang (Siahaan, 2008:37). Dalam pandangan pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan terikat dalam proses bisnisnya, yaitu perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, masyarakat, dan lingkungannya. Hubungan yang baik dengan para *stakeholder* bukan saja membawa manfaat kepada *stakeholder*, tetapi juga manfaat jangka panjang kepada perusahaan. Hubungan bersinergi antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan hidup adalah suatu keniscayaan karena hubungan pada abad ke-21 ini merupakan pola

hubungan saling ketergantungan. Namun inisiatif hubungan lebih ditekankan pada perusahaan. Sebab, perusahaan memiliki risiko dan sumber daya yang lebih banyak untuk membangun dan memberi manfaat pada lingkungannya (Rachman, 2011:80).

CSR merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *good corporate governance* karena implementasi dari CSR merupakan bagian dari salah satu prinsip yang dipegang dalam *good corporate governance*. Menurut Mas Ahmad Daniri (2005:9) dalam Charolinda, (2006:89) pada dasarnya ada lima prinsip dalam *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Prinsip yang berkaitan erat dengan CSR adalah responsibilitas yaitu aspek pertanggung-jawaban dari setiap kegiatan perusahaan kepada para *stakeholders* di mana di dalamnya termasuk komunitas masyarakat yang ada di sekitar tempat beroperasinya perusahaan. Penerapan prinsip ini di dalam *good corporate governance* akan mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan prinsip CSR karena dalam berusaha, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian korporasi dewasa ini memiliki berbagai aspek tanggungjawab. Korporasi harus dapat mengelola tanggungjawab ekonominya kepada pemegang saham, memenuhi tanggungjawab hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggungjawab sosial kepada *stakeholders* (para pemegang kepentingan) (Harnowo, 2007: 2).

Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu CSR adalah: pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) di mana suatu perusahaan membantu mengatasi problem sosial dan lingkungan, oleh karena itu

perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; kedua, di samping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat (Wiwoho, 2008: 111). Sepanjang yang dapat ditangkap, kesan yang muncul tentang CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan selama ini adalah berupa aksi-aksi bagi sumbangan untuk kaum miskin, korban bencana alam, pemberantasan penyakit menular, atau pendidikan anak kolong dan aktifitas yang mirip itu. Belum banyak pelaku bisnis yang memaknai CSR tersebut sebagai sesuatu yang strategis sehingga tidak menempatkannya dalam jantung strategi perusahaan. Masih banyak yang menganggapnya sebagai liabilitas ketimbang asset yang akan menjadi daya dukung keunggulan dalam bersaing (Ardana, 2008: 208).

Dalam menyikapi CSR, menurut Philip Kotler dalam (Harnowo, 2007: 3) terdapat pendapat yang setuju dan juga yang menolaknya, karenanya argumentasi yang mendukung menyatakan bahwa CSR diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menyeimbangkan antara kekuatan korporasi dengan aspek tanggungjawab;
2. Mengurangi adanya regulasi pemerintah (yang berlebihan);
3. Meningkatkan keuntungan jangka panjang;
4. Meningkatkan nilai dan reputasi korporasi;
5. Memperbaiki permasalahan sosial yang disebabkan oleh perusahaan.

Kemudian Philip Kotler menambahkan dengan menekankan pada aspek bisnis yaitu CSR dapat:

- a. Meningkatkan penjualan dan pangsa pasar;
- b. Memperkuat posisi merek dagang;
- c. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan memelihara karyawan;
- d. Menurunkan biaya operasi; dan
- e. menarik minat investor dan para analis keuangan.

PT.Kalimantan Sawit Kusuma berperan sebagai sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar dengan kapasitas produksi lebih dari 30 ton/TBS/jam, mempunyai kewajiban sosial perusahaan yang harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan sasaran CSR yaitu masyarakat dan lingkungan alam sekitar di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara. Implementasi CSR oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma dengan sasaran masyarakat dan lingkungan alam sekitar sejauh ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab, dengan berbagai bentuk kontribusi nyata yang memberikan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Sekalipun demikian, sejauh mana implementasi CSR itu di masyarakat selama ini belum diteliti secara langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diungkapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi CSR di Perkebunan Sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam sudah maksimal?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi CSR di Perkebunan Sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi CSR di Perkebunan Sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat implementasi CSR di Perkebunan Sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi bagi dunia akademik khususnya mengenai usaha perusahaan dalam memberdayakan masyarakat di wilayah operasi dalam bentuk CSR.
2. Manfaat Praktis, secara praktis, penelitian ini dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :
 - a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk lebih menggalakkan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik pemerintah.

- b. Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dalam upaya memperkecil terjadinya konflik-konflik dengan masyarakat ketika menerapkan program CSR.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai kesempatan yang bagus untuk menerapkan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diterima selama kuliah guna diterapkan di kehidupan nyata.
- d. Penelitian berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan acuan dalam membuat penelitian yang sejenis.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Publik .

Istilah kebijakan publik digunakan untuk menunjukkan perilaku suatu aktor. Misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, suatu agen pemerintah atau sekumpulan aktor dalam area tertentu. Secara umum definisi kebijakan publik menyatakan ini adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya, definisi lain menyatakan bahwa kebijakan publik apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tak dilakukan yang merupakan suatu keputusan pemerintah untuk benar-benar dilakukan.

Banyak sekali rumusan-rumusan yang telah diformulasikan oleh para pakar tentang hakikat pengertian dari kebijakan publik. Namun demikian, Santoso (1998: 4-8) memisahkannya ke dalam 2 (dua) kelompok pandangan.

1. Pandangan pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sisi pandang penganut kelompok ini kelihatannya cenderung melihat dari aspek pemerintah, dimana *policy* merupakan refleksi “perilaku” dari pada pemerintah di dalam menghadapi masalah. Sehubungan hal ini, Jones (1991: 4), menyatakan bahwa dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Kebijakan publik dalam pengertian ini tidak saja terbatas pada apapun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, tetapi juga menyangkut apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dilakukan. Pengertian seperti ini mempunyai implikasi bahwa kebijakan publik:

- a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan;
- b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
- c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;
- d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijakan publik setidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (*otoratif*), masyarakat menerima sebagai hak, misalnya pajak harus dibayar, dalam hal ini melainkan suatu tuntutan kebijakan yang dibuat dalam sistem politik.

2. Pandangan kedua, dalam memformulasikan pengertian kebijakan publik, melihat kebijakan publik tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga dari sisi masyarakat.

Yang termasuk ke dalam kelompok yang menganut pandangan ini antara lain adalah Surbakti (1999: 189-190) yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik atau kebijakan umum adalah alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada yang

ditentukan dengan menggunakan patokan-patokan, misalnya “ideologi dan konstitusi, undang-undang, tersedianya anggaran dan sumber daya manusia, efektivitas dan efisiensi, etika dan moral yang hidup di dalam masyarakat dan agama”. Kebijakan publik dalam hal ini merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang didasarkan pada semua norma dan aturan yang ada dalam pemerintah dan masyarakat, dan yang mempunyai tujuan tertentu.

Lepas dari aspek sisi pandang yang manapun, Islamy (1997: 20) menguraikan beberapa elemen penting yang ada dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

B. Teori Implementasi

Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan “*policy delivery system*” (sistem penyampaian / penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan sasaran-sasaran yang dikehendaki. (Solichin Abdul Wahab, 2008 : 185).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Riant Nugroho 2003 : 158)

Mengenai pentingnya Implementasi dalam keseluruhan proses kebijaksanaan disampaikan oleh Udoji dalam Abdul Wahab (2005 : 59) yang mengatakan bahwa :

“The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Dalam implementasi suatu program ada beberapa model teori yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Beberapa model teori tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Teori Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn merumuskan sebuah model yang memperlihatkan hubungan antar 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut adalah :

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna untuk menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
- b. Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan.
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana. Karakteristik badan-badan pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi dalam menjalankan suatu kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

f. Kecenderungan pelaksana (*implementers*)

Ada tiga unsur tanggapan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi (pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan itu. (Budi Winarno, 2008 : 155-166).

2. Teori George C.EdwardsIII (1980)

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yakni :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi (sikap pelaksana)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari sikap setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (AG. Subarsono, 2006 : 90-92)

C. Determinan atau Faktor-faktor Yang Berpengaruh

Menurut George Edward III (1980 : 11-12) terdapat 2 (dua) premis dalam mempelajari Implementasi Kebijakan yaitu :

1) *What are the precondition to success of policy implementation ?*

2) *What are the primary abstacless to policy implementation ?*

Di dalam jawaban pertanyaan tersebut diusulkan empat faktor utama yang mempengaruhi proses Implementasi kebijakan, keempat faktor itu adalah :

- a) Komunikasi, faktor ini penting mengingat bahwa suatu kebijakan yang akan disampaikan harus benar-benar dipahami oleh pelaksananya.
- b) Sumberdaya, dipandang penting untuk mendukung keefektifan dan keberhasilan kebijakan.
- c) Disposisi atau sikap pelaksana dalam arti kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan.
- d) Struktur birokrasi yaitu yang berkaitan dengan prosedur kerja.

Berkenaan diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka perlu adanya pemberdayaan dalam organisasi. Menurut pendapat Bennis dan Mitsche (dalam Sedarmayanti, 2000 : 79) dinyatakan bahwa pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokrasi yang mengkotak-kotak orang yang membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energy dan ambisinya.

Hal demikian berarti dalam upaya pemberdayaan memberikan peluang kepada mereka untuk mengembangkan suatu perasaan memiliki bagian-bagian dari suatu proses, khususnya yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun hal ini pada saat yang sama juga menuntut mereka menerima suatu bagian tanggung jawab dan kepemilikan yang lebih luas dari keseluruhan proses. Sedangkan menurut Pranaka

(1996:56-57) terdapat dua makna dalam pemberdayaan yaitu yang pertama mempunyai kecenderungan primer yaitu proses yang lebih menekankan kepada memberikan atau mengalihkkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat baik individu maupun organisasi dengan maksud agar menjadi lebih berdaya.

Sedangkan yang kedua, bermakna kecenderungan sekunder yaitu yang lebih menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Menurut Syafaat Widjajabrata (1996 : 62), perencanaan adalah : “Suatu proses penetapan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada kegiatan masa datang dengan sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan organisasi”.

Adapun peran kebijakan dalam kaitannya dengan perencanaan yaitu bahwa kebijakan merupakan bagian dari penetapan dan penjelasan misi organisasi dan tujuan dari manajemen yang tertinggi. Dalam kaitan ini, suatu kebijakan berfungsi mengarahkan kegiatan pada tujuan yang hendak di capai dan mencegah penyimpangan dari rencana tindakan yang sudah ditetapkan, dengan cara menyediakan aturan-aturan tindakan-tindakan yang lebih lanjut bagaimana aturan tersebut harus dilakukan. Pada tataran demikian ini, seluruh kegiatan pencapaian tujuan yang dituangkan dalam perencanaan, harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian maka kebijakan mendasari perencanaan dalam organisasi.

Menurut pendapat Syafaat Widjajabrata (1998 : 61) menyatakan bahwa :
”Banyak sekali satuan organisasi terutama yang ada dilingkungan pemerintah, memandang perencanaan sebagai kegiatan formal belaka dan kegiatan tersebut hanya merupakan urusan satuan organisasi yang tingkatnya lebih tinggi”. Dalam pandangan yang demikian itu, satuan organisasi yang lebih rendah tidak perlu menyusun rencana, akan tetapi hanya sekedar melaksanakan mengenai apa yang telah ditentukan oleh pemimpin organisasi yang tingkatannya lebih tinggi.

Pandangan demikian tentunya kurang tepat, mengingat bahwa setiap jenjang organisasi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepadanya. Oleh sebab itu, semakin tinggi jenjang organisasi maka semakin strategis perencanaan yang dibuat. Sedangkan semakin rendah jenjang organisasi maka semakin operasional perencanaan.

Patokan utama dalam perencanaan adalah :

1. Diselenggarakan dalam organisasi
2. Mempertimbangkan sumber daya
3. Berorientasi ke masa depan
4. Menunjuk jenis kegiatan yang spesifik
5. Mencakup siapa yang melaksanakan
6. Mencakup metode pengukuran

Selanjutnya dalam hubungan dengan implementasi Kebijakan politik pada Studi Kebijakan Negara, Abdul Wahab (1990 : 123_) mengemukakan :

“...perlu kiranya kita sadari bahwa mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan Negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengimplementasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”.

Selanjutnya daripada itu dalam Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi dikemukakan, Abdul Wahab (1997 : 63) bahwa :

“ ...dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni :

- a) Pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan (*the center* atau pusat).
- b) Pejabat-pejabat pelaksana dilapangan (*the periphery*);
- c) Aktor-aktor perseorangan diluar badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*)”.

Dari statemen diatas dapat diketahui bahwa dalam proses Implementasi Kebijakan Publik tentunya akan ditemui peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan baik dalam rangka usaha dilakukan maupun dampak yang terjadi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.

Secara lebih eksplisit, Abdul Wahab (1997: 127-131) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi lancar tidaknya implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Keputusan-keputusan yang telah dibuat pada tahap rancangan atau perumusan berpengaruh terhadap lancar tidaknya implementasi suatu kebijakan.
2. Proses implementasi suatu kebijakan sebagian besar dipengaruhi oleh macam-

macam yang ingin dicapai dan oleh cara dengan mana tujuan itu dirumuskan.

3. Macam-macam kebijakan yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik yang dirangsang oleh proses pembuatan kebijakan tersebut.
4. Program-program yang dimaksudkan untuk menyediakan manfaat-manfaat yang dapat dibagi habis, yang kemungkinan lebih membangkitkan jenis tuntutan yang sifatnya partikularistik pada tahap implementasinya.
5. Perubahan perilaku yang dikehendaki pada pihak yang menerima manfaat dari program tertentu adalah merupakan bentuk lain bagaimana isi kebijakan mempengaruhi implementasinya.
6. Program yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang mungkin akan lebih jauh sukar untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan program-program yang dirancang untuk memberikan/membuahkan manfaat segera pada pihak kelompok-kelompok sasaran.
7. Isi dari berbagai kebijakan kerap kali juga menentukan letak/posisi implementasinya.
8. Semakin besar posisi implementasi, baik secara geografis maupun secara organisatoris, maka semakin sulit pula tugas-tugas implementasi suatu program, karena makin banyak jumlah satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.
9. Keputusan-keputusan pada saat perumusan kebijakan dapat pula menunjukkan siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan berbagai program yang ada, dan keputusan-keputusan yang demikian ini dapat mempengaruhi bagaimana seyogyanya kebijakan itu diwujudkan.

10. Bentuk tujuan kebijakan itu dirumuskan, juga membawa dampak terhadap implementasinya.

Dari kajian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi di atas, jelaslah bahwa isi program dan isi kebijakan publik berpengaruh terhadap hasil akhir implementasi yang dikehendaki, karena dampaknya yang nyata atau yang potensial terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi tertentu.

D. Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pengertian

Corporate Social Responsibility, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Di Amerika, konsep ini seringkali disamakan dengan istilah "*Corporate Citizenship*". Pada intinya, keduanya dimaksudkan pada upaya perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan usaha mereka dan juga ke dalam cara-cara perusahaan berinteraksi dengan *stakeholder* perusahaan (Charolinda, 2006: 87-88). CSR oleh *World Business Council for Sustainable Development* didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar, serta public pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka. *Business for Social Responsibility* mendefinisikan CSR sebagai pengoperasian bisnis dengan cara memenuhi, atau bahkan melebihi, nilai-nilai etika, hukum, komersial, dan ekspektasi publik. Sedangkan Philip Kotler mendefinisikannya sebagai komitmen

korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktis bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi (Harnowo, 2007: 1).

World Council for Sustainable Development menyebut CSR sebagai “*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and social at large*”. Menurut Bank Dunia “*CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic-development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*” (Ardana, 2008: 208-209). Sementara *European Union* merumuskan CSR sebagai “*...a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*”.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “...tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” (Azheri, 2009: 37-38).

Berdasarkan banyak macam definisi mengenai CSR yang dikemukakan oleh berbagai pihak, Mark S. Schwartz merumuskan setidaknya ada 5 (lima) elemen pokok yang terkandung di dalam setiap definisi. Kelima elemen pokok tersebut adalah (Schwartz, 2011: 18-19):

- a. Korporasi mempunyai tanggungjawab lebih dari sekedar memproduksi barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan.
- b. Tanggungjawab ini meliputi keharusan untuk berperanserta dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, terutama yang merupakan dampak dari kegiatan produksi mereka.
- c. Tanggungjawab korporasi bukan hanya sekedar kepada para pemegang saham saja, tetapi lebih luas dari itu.
- d. Dampak dari kegiatan korporasi tidak hanya sekedar pada transaksi pasar saja.
- e. Korporasi melayani nilai-nilai kemanusiaan yang dimensinya lebih luas daripada sekedar nilai-nilai ekonomi saja.

2. Ruang Lingkup CSR

Prince of Wales International Business Forum merumuskan lima pilar, yaitu hal-hal yang harus dilaksanakan di dalam CSR. Lima pilar tersebut adalah (Ardana, 2008: 209):

- a. *Building Human Capital*, menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang handal (internal). Di sini perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya melalui *community development*.
- b. *Strengthening economies*, menyangkut upaya-upaya perusahaan untuk memberdayakan ekonomi komunitas.
- c. *Assessing social*, di sini perusahaan harus menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar terhindar dari timbulnya suatu konflik.

- d. *Encouraging good governance*, artinya perusahaan dikelola dalam tata pamong/birokrasi yang baik.
- e. *Protecting the environment*, adalah upaya perusahaan untuk mengawal kelestarian lingkungan.

Vernon A. Musselman-John H. Jackson berpendapat bahwa ruang lingkup CSR meliputi tanggungjawab sosial perusahaan atas kesehatan, informasi konsumen, menyewa ahli praktik, tidak menjalankan diskriminasi, serta memelihara lingkungan fisik. Hampir sama dengan pendapat tersebut adalah pendapat yang diberikan oleh Basu Swastha DA dan Ibnu Sukotjo W, bahwa tanggungjawab sosial perusahaan mencakup hal-hal seperti bidang kesehatan, informasi konsumen, praktik tanpa diskriminasi, dan pemeliharaan lingkungan fisik. Sonny A. Keraf membedakan tanggungjawab sosial perusahaan menjadi 2 (dua), berdasar jalur relasi perusahaan dengan masyarakat yaitu (a) relasi primer dan (b) relasi sekunder. Terhadap relasi primer, tanggungjawab ini meliputi pemenuhan kontrak dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar hutang, pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dan pelanggan, menjamin mutu barang dan jasa yang ditawarkan, memperhatikan hak dan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan, dan lain-lain. Terhadap relasi sekunder, perusahaan bertanggungjawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, pajak, dan sebagainya (Adjie, 2008: 73).

E. Strategi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dilihat dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat, dikenal sebagai *corporate social responsibility* atau *social responsibility of corporation*. Kata *corporation* atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar. Dilihat dari asal katanya, “perusahaan” berasal dari bahasa Latin “*corpus/corpora*” yang berarti badan.

Dari sisi etimologis CSR kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan dari sisi terminologis CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

CSR juga dapat didefinisikan sebagai upaya manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi sosial dan lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar. Pada kenyataan di lapangan, CSR masih tak lepas dari kekacauan konsep, pengistilahan, maupun penerapannya.

Corporate social responsibility biasanya dipahami sebagai cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, environment atau lingkungan dan persoalan-persoalan sosial dan dalam kurun waktu yang sama bisa memenuhi harapan dari *shareholders* maupun *stakeholders*.

Dalam rangka menciptakan *Good CSR* harus memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability* dan

responsibility, secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR, termasuk *community development*.

1. *Engagement*

Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan *trust* masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun "kontrak sosial" antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

2. *Assessment*

Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada *rights-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. *Plan of Action*

Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk *shareholders* di lain pihak.

4. *Action and Facilitation*

Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

5. *Evaluation and Termination or Reformation*

Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui *capacity building* terhadap masyarakat (*stakeholders*) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri.

Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*reformation*), maka perlu dirumuskan *lessons learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.

Dalam prakteknya, upaya CSR dapat ditelaah dan dilakukan dengan mengacu pada tiga sisi yaitu :

a) *Enabling*

Adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan

mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b) Empowering

Adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

c) Protecting

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Ketiga kerangka pemikiran tersebut harus ditambah dengan konsep *sustainability* dan *integrated development*. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, salah satu aspek mendasar dari CSR adalah *sustainability* atau berkelanjutan. Dimana setiap program dan kegiatan CSR tidak hanya dilaksanakan untuk jangka

waktu pendek. Melainkan dapat diterapkan dalam kurun waktu tertentu dengan membuat serangkaian kegiatan, dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti lingkungan, sosial, religi. Sebagai contoh setelah masyarakat mendapatkan bantuan modal usaha, perusahaan membuat pelatihan dan pengusaha kecil dan mikro ini juga diajarkan cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setelah usaha cukup maju masyarakat juga diajarkan bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha tersebut, sehingga sumber daya lokal dapat terserap. Dengan pola pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi diharapkan dapat memberikan alternatif terobosan baru untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dan rumit dalam dekade terakhir.

F. Kerangka Berpikir

Implementasi Program CSR dalam kegiatan usaha pembangunan perkebunan kelapa sawit dan Pabrik Kelapa Sawit perusahaan menerapkan pola kemitraan, yakni pola kemitraan PIR-TRANS KKPA, Pola Inti Plasma, Pola Inti, dan Pola Kemitraan Usaha Ekonomi Produktif. Salah satu bentuk pola kemitraan ekonomi produktif yang diamanahkan melalui berbagai peraturan perundangan adalah melalui program CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Program CSR adalah memberikan sumbangan pemikiran, pembangunan fisik dan biaya, dan apabila dimungkinkan memberikan alih daya dan atau transformasi

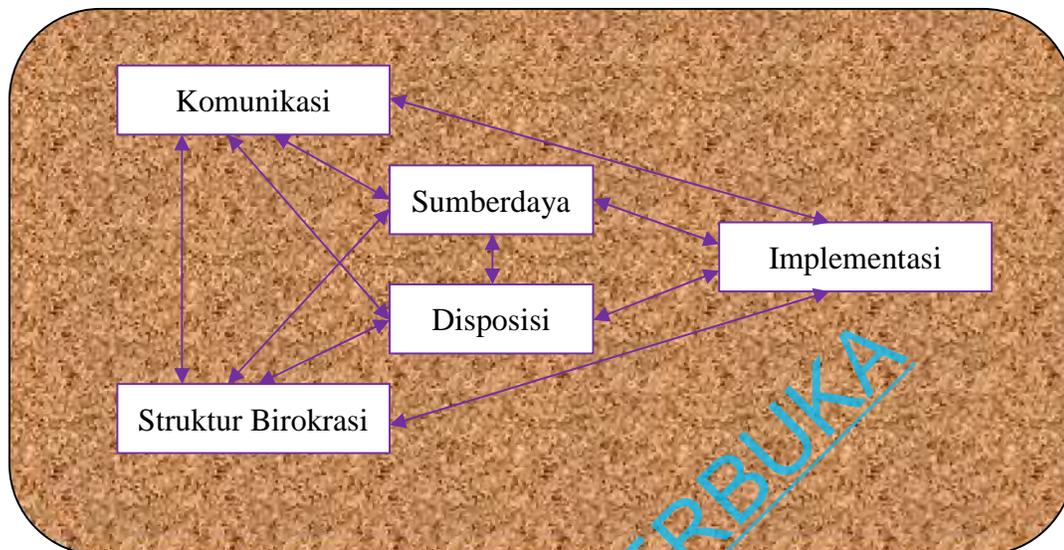
berbagai teknologi, peradaban, sesuai dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat dan potensi sumber daya lainnya untuk membantu memecahkan kesulitan masyarakat dalam upaya mewujudkan sasaran program kegiatan CSR untuk kehidupan bermasyarakat yang sehat, memiliki kemandirian dalam penataan kehidupan baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan.

Mengacu dari yang telah disampaikan di atas dan fenomena yang terjadi dalam implementasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma pada perencanaan identifikasi dan observasi di desa-desa yang berdekatan dengan kegiatan operasional, meliputi: Balai Riam, Desa Jihing, Desa Air Dua, Desa Petarikan, Desa Pempining, Desa Nibung Terjun, Desa Ajang, Pangkalan Muntai, SP I, SP II, SP III, SP IV, dan SP V maka permodelan pada penelitian ini mempergunakan model implementasi Edward III.

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi Edward III. Hal ini dikarenakan model implementasi Edward III lebih tepat digunakan sebagai alat untuk mengkaji implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma. Hal ini berarti 4(empat) variabel (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi) dalam model dapat digunakan untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang menghambat CSR yang dilakukan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma.

Model implementasi Edward III yang dapat digambarkan sebagai berikut (Indiahono, 2009:33):

Gambar 2.1. Model Implementasi Edward III



Sumber : Indiahono, 2009

Adapun definisi masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut (Indiahono, 2009:31-32):

1. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran. Hal ini penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan.
2. Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP). SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak

berbelit, dan mudah dipahami karena SOP menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

3. Sumberdaya, yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumberdaya finansial merupakan kecukupan modal investasi atas kebijakan.
4. Disposisi, yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan (korelasi), menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif (Suryabrata, 1998: 17). Pendekatan penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2006: 234).

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya (Irawan 2004; dalam Baroroh, 2008: 1). Pendapat tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Nazir (1999: 63) bahwa penelitian diskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan di antara fenomena yang diselidiki. Budiarto (2002: 28) menyatakan penelitian deskriptif sebagai penelitian dengan pendekatan *cross-sectional* yang dilakukan secara murni untuk mengadakan deskripsi tanpa dilakukan analisis yang mendalam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang implementasi CSR oleh PT. Kalimantan Sawit Kusumah di Kecamatan Balai Riam.

B. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan atau narasumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive*. Teknik *purposive* mendasarkan pemilihan informan atas pertimbangan sifat-sifat dan tujuan yang tertentu berdasarkan kepentingan informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini. Informan ini memiliki pengetahuan yang cukup dan data yang memadai tentang permasalahan penelitian. Jadi yang diambil sebagai informan karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Informan dalam penelitian ini sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Informan dan Informasi yang Digali

No	Keterangan	Informasi yang digali
1	Staf manajemen perusahaan (Kepala Bagian CSR)	1. Bagaimana Implementasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program CSR tersebut?
2	Karyawan sebagai sasaran internal perusahaan (Bagian HUMAS)	
3	Pemerintah setempat (Kepala Desa)	
4	Masyarakat di kecamatan Balai Riam sebagai sasaran eksternal perusahaan (Ketua RT/Ketua RW)	
5	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Pengembangan Sumber Daya Manusia)	

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sekaligus instrumen penelitian, di samping itu, peneliti juga menyusun pedoman wawancara sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data di lapangan.

D. Fokus Penelitian

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di dalam penelitian ini tetap diperlukan ruang lingkup atau fokus penelitian untuk membatasi bidang studi atau bidang penelitian. Karena sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan, sehingga perlu adanya pembatasan.

Yang menjadi fokus penelitian implementasi program CSR adalah:

1. Mekanisme implementasi CSR
2. Proses penetapan perencanaan CSR
3. Faktor-faktor penghambat implementasi implementasi CSR :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak dan mimik narasumber merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (Gulo, 2000: 119). Dalam wawancara kita tidak hanya bisa menangkap ide atau pemahaman responden, namun juga perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang dimilikinya.

Wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur (*non direct interview*), yaitu suatu teknik tanya jawab yang tidak menggunakan pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis. Tujuan dari melakukan wawancara secara kualitatif adalah memahami pandangan dan pengalaman dari orang yang diwawancarai, oleh karena itu maka kita harus mampu menangkap lebih jauh mengenai apa yang dikatakan, apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka merasa, apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang mereka ketahui.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang staf manajemen dari PT. Kalimantan Sawit Kusuma, dan juga beberapa orang dari karyawan yang berasal dari perusahaan, Pemerintah setempat, masyarakat di Kecamatan Balai Riam sebagai sasaran eksternal perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran umum mengenai implementasi CSR oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma terhadap masyarakat di Kecamatan Balai Riam.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu (Gulo, 2000: 123). Teknik Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2004:105). Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data penunjang yang memperlihatkan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia di sekitar wilayah operasi perusahaan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1989: 268) dalam Moleong (2002: 103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data berbeda dengan penafsiran data. Analisis data lebih memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah melalui (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) menarik kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 1994: 10). Reduksi data merujuk pada proses pemilihan dan pemilahan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Pengkodean (*coding*) merujuk pada teknik-

teknik pereduksian data yang antara lain meliputi pencatatan-pencatatan, pola pengkodean, dan matrik waktu-peran-efek.

Adapun penjabaran dari masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perbaikan dan penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus, bahkan sebelum data terkumpul antisipasi akan adanya data yang sudah tampak, ketika memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, proses penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Pilihan-pilihan terhadap data mana yang diambil, mana yang dibuang, pola-pola apa yang dihasilkan atau cerita apa yang sedang berkembang merupakan pilihan analisis, sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik.

2. Display Data

Display data atau penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun sekumpulan informasi yang diperoleh dan diarahkan supaya memberi kemungkinan pada penarikan kesimpulan, verifikasi dan pengambilan tindakan. Dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan dapat membantu lancarnya penelitian.

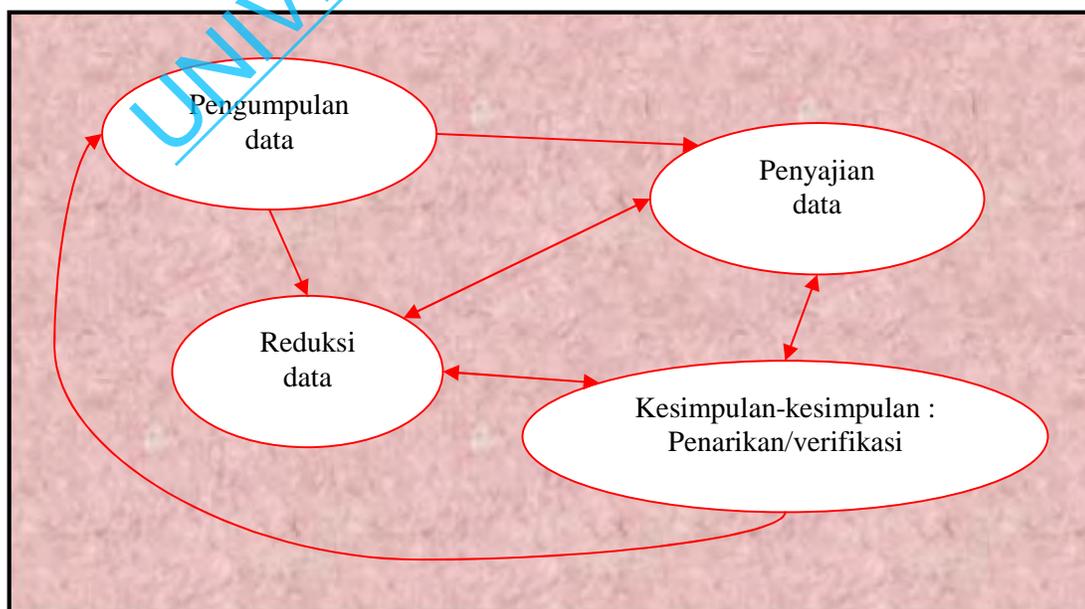
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau ulang pada laporan-laporan untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif. Dengan meninjau ulang laporan-laporan akan mempermudah dalam upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Creswell (2008; dalam Raco, 2010: 76) merumuskan tahap-tahap analisis data hasil wawancara dengan langkah awal yaitu membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambil meringkas dan menghilangkan duplikasi-duplikasi, dilanjutkan dengan membuat peng-kode-an (*coding*) atau klasifikasi, di mana hasil koding ini akan menelorkan pola-pola umum atau tema-tema.

Proses analisis data kualitatif itu digambar dalam ilustrasi seperti di bawah ini.

Gambar 3.1. Proses Analisis Data Kualitatif



Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap analisis, yang terdiri dari langkah-langkah penyusunan ringkasan terstruktur dan synopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, atau matriks dengan teks. Tahap ketiga berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji, dan rumusan rekomendasi. Kesimpulan yang diharapkan muncul dari penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk memperoleh keabsahan data maka dalam analisa ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti melakukan *cross* dan *check* dengan memberikan pertanyaan yang sama pada nara sumber yang berbeda-beda (informan) yang telah ditentukan sehingga dapat ditarik kesimpulan analisa yang signifikan atas permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit

PT. Kalimantan Sawit Kusuma merupakan Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit. Kantor pusat berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 41-42 AB, Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan, untuk lokasi kegiatan usaha berada di wilayah Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Permata Kecubung, dan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara.

Pendirian PT. Kalimantan Sawit Kusuma didasarkan pada legalitas usaha sebagai berikut :

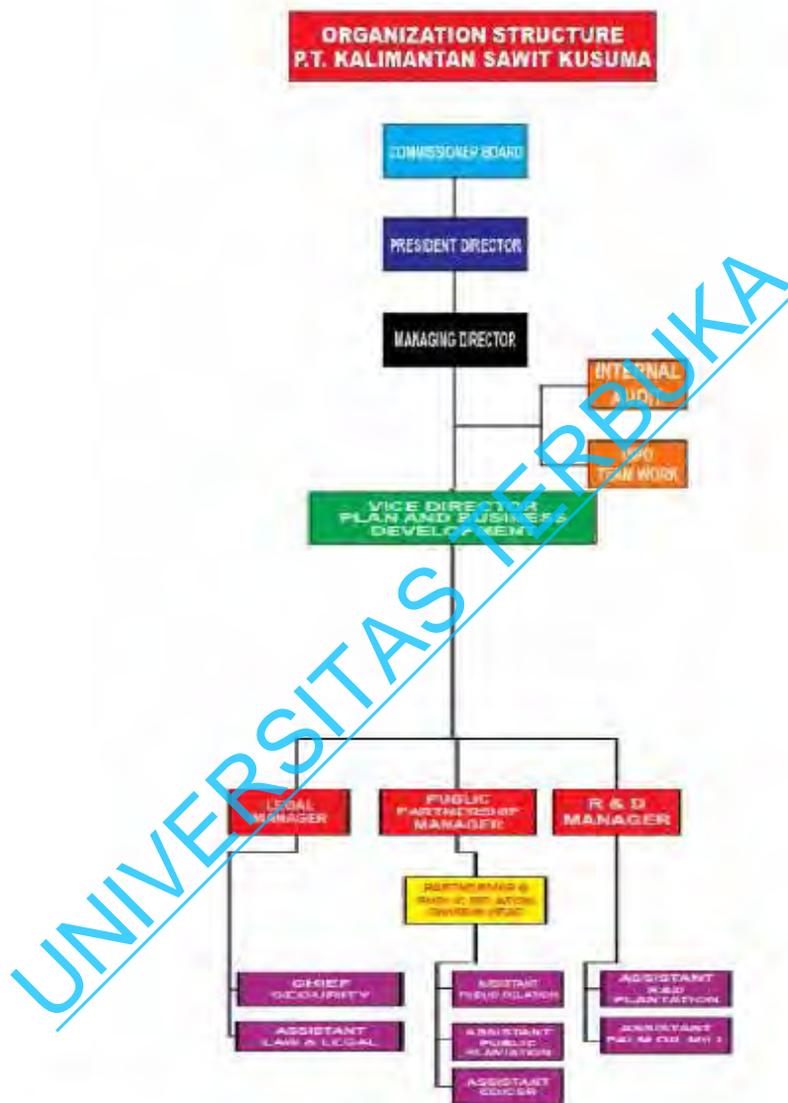
Tabel 4.1 Legalitas Usaha

No	Jenis Perizinan	Instansi Pemberi Ijin	Nomor Surat	Tanggal
1	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Kantor Wilayah Pajak Pontianak	01.564.310.701.000	-
2	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Bupati Sukamara	670/333/Dispenda/IX/2006	11-09-2006
3	Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPKP)	Kantor Pelayanan Pajak Sampit	PEM-42/WPJ.10/KP.04.03/2001	18-06-2001

No	Jenis Perijinan	Instansi Pemberi Ijin	Nomor Surat	Tanggal
4	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	Walikotamadya Pontianak	1603.08/KP3T/R-VI/S/2008	27-05-2008
5	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	Bupati Sukamara	219/EK.503/B/VII/2006	21-07-2006
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Perindustrian Pontianak	14.03.1.51.00923	21-07-2006
7	Surat Pendaftaran Perusahaan (SPP)	Bupati Sukamara	444/KS/2006	21-07-2006
8	Surat Keterangan Domisili	Kelurahan Benua Melayu Darat	503/65/EKBANG/VIII/2008	20-08-2008
9	Surat Ijin Domisili	Bupati Sukamara	219/EK.503/DC/VII/2006	21-07-2006
10	Ijin Gangguan (HO)	Bupati Sukamara	45/EK.503/HO/VII/2006	21-07-2006
11	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	KEP.187/NT.3-1/V/2008	05-05-2008
		Dinas Tenaga Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara	560/109/NAKER/II/2008	11-02-2008

Sumber : PT. Kalimantan Sawit Kusuma (2013)

Gambar 4.1. Struktur Organisasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma



Catatan : Pelaksanaan CSR dibidangi oleh Assisten Public Relation

Sumber : PT. Kalimantan Sawit Kusuma (2013)

Gambar 4.2. PT. Kalimantan Sawit Kusuma Balai Riam *Estate*



Sumber : PT. Kalimantan Sawit Kusuma (2013)

PT. Kalimantan Sawit Kusuma mulai membangun kebun kelapa sawit di Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara (dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat) sejak tahun 1996. Penanaman kelapa sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma dimulai pada tahun 1997. Sampai dengan tahun 2002 pembangunan kebun dengan pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi – KKPA sudah mencapai luas 8.000 Ha atau 100% dari rencana dengan jumlah petani peserta sebanyak 4.000 KK yang terdiri dari masyarakat transmigran dan masyarakat setempat. Pada tahun-tahun pertama panen, hasil panen berupa Tandan Buah Segar (TBS) dijual ke pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit perusahaan lain, mulai

sejak bulan Maret 2002 TBS diolah di pabrik pengolahan minyak kelapa sawit milik PT. Kalimantan Sawit Kusuma dengan kapasitas terpasang 40 ton TBS/jam.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengolahan minyak kelapa sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma, maka kapasitas olah dan jam olah (jam operasi) PKS harus optimal. Dengan peningkatan efektifitas ini diharapkan nilai K (proporsi yang harus diperoleh petani dalam penetapan harga TBS) untuk PKS PT. Kalimantan Sawit Kusuma dapat lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan harga beli TBS dari petani. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku TBS dalam jumlah yang cukup dan secara terus-menerus, PT. Kalimantan Sawit Kusuma merencanakan akan membangun Kebun Inti seluas 6.000 Ha. Operasional PKS PT. Kalimantan Sawit Kusuma saat ini ditunjang oleh suplai bahan baku TBS dari PT. Harapan Hibrida Kalbar dan PT. Graha Cakra Mulia. Dengan adanya rencana PT. Harapan Hibrida Kalbar dan PT. Graha Cakra Mulia untuk membangun pabrik sendiri, maka PT. Kalimantan Sawit Kusuma harus mengupayakan sendiri bahan baku dengan membangun kebun inti dalam luasan yang optimal.

Pada awalnya pembangunan Kebun Inti sudah direncanakan bersamaan dengan pembangunan Kebun Plasma, tetapi dengan adanya krisis moneter pada tahun 1997/1998, Direksi PT. Kalimantan Sawit Kusuma memprioritaskan untuk terlebih dahulu membangun Kebun Plasma. Oleh karena itu, pembangunan Kebun Inti secara intensif dilaksanakan setelah pembangunan Kebun Plasma.

Pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Kalimantan Sawit memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Sosial

a. Kesempatan kerja

Pembangunan kebun kelapa sawit PT. Kalimantan Sawit Kusuma di wilayah Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara telah membuka kesempatan kerja yang cukup luas di tingkat lokal dan regional.

b. Kesempatan berusaha

Pembangunan kebun kelapa sawit terpadu PT. Kalimantan Sawit Kusuma mendorong kesempatan berusaha bagi masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan usaha yang berkembang meliputi : warung makan, toko kelontong, wartel, jasa transportasi, dan lain sebagainya.

c. Peningkatan kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat di sekitar kebun yang bekerja sebagai karyawan maupun yang membuka usaha, tingkat kesejahteraannya mengalami peningkatan walaupun belum dapat tercapai secara optimal.

2. Manfaat Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pembangunan kebun kelapa sawit terpadu oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma, pemerintah daerah mendapatkan pemasukan dari : pajak bumi bangunan, retribusi, dan pajak lainnya.

3. Manfaat Lingkungan

a. Pelestarian Sumber Daya Lahan

Keberhasilan pengembangan kelapa sawit di lokasi-lokasi yang cocok untuk tanaman ini akan membantu pemerintah dalam rangka pengalokasian dan penetapan manfaat sumber daya lahan bagi kepentingan ekonomi setempat. Pelestarian sumber daya alam termasuk kelapa sawit, yang mampu memberi kesempatan luas bagi para pengusaha untuk bergerak dalam subsektor budidaya maupun dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik ini merupakan upaya yang akan mengurangi dampak penggunaan kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Sukamara karena usaha tani ini telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Konservasi Tanah

- 1) Dengan pembangunan kebun yang dilakukan dengan teknologi pemupukan berimbang akan meningkatkan kesuburan tanah.
- 2) Dengan pembangunan kebun maka areal tersebut sebagai kawasan resapan air.
- 3) Dengan pembangunan kebun akan mengurangi erosi tanah.
- 4) Selain daripada itu, dengan pembangunan kebun akan mengurangi pemanasan global serta memproduksi udara.

B. Gambaran Umum Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kegiatan investasi pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya lahan di wilayah Kabupaten Sukamara yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma merupakan komitmen dalam upaya keikutsertaan memberikan kontribusi pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada dasarnya akan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan apabila melibatkan partisipasi masyarakat sekitar, oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembangunan perkebunan kelapa sawit dan Pabrik Kelapa Sawit perusahaan menerapkan pola kemitraan, yakni pola kemitraan PIR-TRANS KKPA, Pola Inti Plasma, Pola Inti, dan Pola Kemitraan Usaha Ekonomi Produktif. Salah satu bentuk pola kemitraan ekonomi produktif yang diamanahkan melalui berbagai peraturan perundangan adalah melalui program CSR. Konsep CSR yang terus berkembang dan belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. CSR adalah kegiatan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang berkomitmen tidak hanya menguntungkan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Pengertian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines* (*profit, planet dan people*). PT. Kalimantan Sawit Kusuma sebagai perusahaan nasional tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, akan tetapi memiliki

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, PT. Kalimantan Sawit Kusuma berkomitmen untuk membangun manusia dan lingkungan secara berkelanjutan dengan menerapkan suatu prosedur yang tepat dan profesional. Dengan demikian perusahaan setidaknya sejalan dengan tiga komponen penting terhadap *sustainable development* dan atau pembangunan perkebunan kelapa sawit terintegrasi dengan pengolahan yang berkelanjutan, meliputi *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*. Pada dasarnya masyarakat dibedakan ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, masyarakat dalam arti sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah geografis, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten. *Kedua*, masyarakat dalam arti komunitas lokal (*local community*) yang menunjuk pada sekelompok orang yang berinteraksi dalam skala kecil dan memiliki karakteristik sosial budaya yang relatif homogen. PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam menjalankan kegiatan usaha berlokasi di tengah-tengah kolaborasi antara yang pertama dan kedua karena sekelompok masyarakat bertempat tinggal di wilayah geografis cukup strategis artinya berdekatan dengan pemerintahan (Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) akan tetapi masih menganut budaya yang relatif *homogeny*. Masyarakat di sekitar kegiatan PT. Kalimantan Sawit Kusuma di kategorikan masyarakat maju sekaligus masyarakat tradisional karena memiliki karakteristik sosial budaya yang heterogen, terletak di wilayah pusat pemerintahan desa (Kelurahan dan Kecamatan), pertokoan dan telah memiliki aksesibilitas yang cukup baik dan fasilitas publik yang memadai (sekolah, puskesmas) akan tetapi

pendidikannya masih relatif rendah dan pada umumnya bermata pencarian sebagai petani. Dengan kondisi tersebut tuntutan, kebutuhan, dan masalah yang dialami masyarakat mempunyai karakteristik yang berbeda.

CSR merupakan kontribusi perusahaan bagi pembangunan berkelanjutan di kabupaten Sukamara khususnya dan di wilayah Kecamatan Balai Riam, kecamatan permata kecubung, dan Kecamatan Sukamara khususnya. Kondisi ini dimaknai oleh sebagian besar masyarakat bahwa perusahaan wajib memberikan kepada masyarakat sebagai konsekuensi kegiatan usahanya. Sedangkan CSR sendiri belum ada ketentuan baku sebagai peningkatan, dan salam pelaksanaannya sangat tergantung dari kemampuan perusahaan dan kebutuhan prioritas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan yang sehat. Sumber untuk kegiatan CSR sangat tergantung dari tingkat kemampuan perusahaan. Pada hakekatnya pembangunan daerah bukan hanya bertanggung jawab pemerintah, dunia usaha, akan tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha dalam hal ini PT. Kalimantan Sawit Kusuma ikut memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan hidup, oleh karena itu suatu pengembangan usaha yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dikelompokkan dalam CSR, karena dengan pengembangan usaha akan memberikan kontribusi positif terhadap aspek ekonomi, aspek sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bahwa belum dapat kepentingan masyarakat dalam upaya kecukupan kebutuhan hidup sehat dari

dampak langsung kegiatan usaha dapat diakomodasi melalui kegiatan penguatan dan pemberdayaan lainnya.

Masalah yang terjadi adalah pemaknaan CSR oleh sebagian masyarakat yang masih perlu diluruskan, bahwa program CSR sebaiknya adalah program bersama dimana kebutuhan yang harus dipenuhi dilaksanakan secara bersama-sama antara perusahaan dengan masyarakat untuk menuju pada tingkat kesejahteraan hidup yang kuat dilingkungan yang sehat. Walaupun amanah undang-undang dan peraturan lainnya secara eksplisit CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan, akan tetapi tanpa kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam menentukan prioritas program kegiatan hasilnya akan kurang bermanfaat.

Untuk dapat mengatasi berbagai masalah solusi yang terbaik perusahaan akan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui forum dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, membuang kebersamaan dengan memanfaatkan potensi masing-masing dalam menata dan memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih dimasa mendatang yang lebih sehat, sehingga dapat menciptakan kelangsungan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic*), kelangsungan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat (*sustainable social culture*), dan kelangsungan dan terpeliharanya lingkungan yang baik dan sehat yang berkaitan dengan permasalahan global, emisi gas rumah kaca yang dimanfaatkan oleh pihak asing sebagai salah satu alat untuk menekan Indonesia dalam menerapkan strategi persaingan dagang.

CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Rumusan atau definisi/pengertian yang diuraikan menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR, yakni:

- a. Sebagai *artificial person* perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan tersosialisasi, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- b. Keberadaan (eksistensi) dan berkelangsungan artinya baik perusahaan maupun stakeholder (pemerintah, masyarakat, pemasok, klien, *customer*) memiliki kewajiban untuk keberlangsungan usaha pembangunan yang dapat memberikan kontribusi baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
- c. Sebagai lembaga ekonomi, PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam menjalankan kegiatannya dapat menghasilkan keuntungan wajib mendapatkan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, artinya agar perusahaan dapat tetap terjaga keseimbangan usahanya seluruh *stakeholder* berkepentingan untuk saling membantu secara terintegrasi.

Pemberdayaan masyarakat (*community development*) atau yang lebih populer saat ini yakni CSR bersifat tidak statis dan hanya bersifat lokal, yang dalam pelaksanaannya melibatkan interaksi dinamis dan partisipatoris antara beragam (*stakeholders*) pemerintah, masyarakat setempat, pendamping). Dengan demikian

pemberdayaan masyarakat tidak harus terjebak pada dikotomi "*bottom up versus top-down planning*" maupun "*local development versus global development*". Pengembangan masyarakat adalah bagian dari strategi praktik pekerjaan sosial makro. Beberapa frasa lain yang sering dipertukarkan dengan *Community Development* antara lain: *Community Organizing, Community Work, Community Building, Community Capacity Building, Community Empowerment, Community Participation, Ecologically Sustainable Development, Community Economic Development, Social Capital Formation*. *Community Development* sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama kesetaraan yang mengekspresikan nilai-nilai, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar yang berkelanjutan. Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan adalah inti yang ingin dikembangkan PT. Kalimantan Sawit Kusuma berkenan bagaimana mempengaruhi struktur dan relasi kekuasaan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah orang berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Humas PT. Kalimantan Sawit Kusuma khususnya bagian Hubungan Eksternal (HE) memiliki Program Bina Wilayah sebagai salah satu kegiatan CSR perusahaan. Dalam kegiatannya bagian HE berkaitan dengan pembinaan hubungan baik dengan *public* luar perusahaan sehingga tercipta citra positif perusahaan. Bagian HE memiliki beberapa staf yang berkonsentrasi pada bidang-bidang tertentu itu *Government Relation, Non-Government Relation, dan Community Relations*. Kegiatan dalam

program Binwil yang dilakukan oleh bagian HE Dept. Humas PT. Kalimantan Sawit Kusuma berfungsi untuk:

a. Pembentukan *Brand Image* dan *Sense of Belonging* terhadap Perusahaan

Humas berfungsi membangun hubungan baik dengan khalayak guna menumbuhkan citra positif perusahaan dengan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan sesuai dengan khalayak yang ingin dituju. Membangun citra perusahaan dapat melalui berbagai cara salah satunya adalah melalui program CSR. Melalui program ini CSR Binwil Humas PKT coba melakukan komunikasi timbal balik dengan publik eksternal lewat program-programnya yang bersifat *Charity* dan *Philantrophy*. Melalui program-program ini diharapkan akan terbentuk sebuah brand image yang baik terhadap PT. Kalimantan Sawit Kusuma. Dari timbulnya *Brand Image* yang baik akan timbul juga sebuah kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pada nantinya semua proses ini akan berujung pada tumbuhnya *Sense of Belonging* masyarakat terhadap perusahaan.

b. *Corporate Publisitas*

Program Binwil yang dilakukan Bidang HE Humas PT. Kalimantan Sawit Kusuma, dapat menjadi sebuah saluran publikasi yang efektif mengenai komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Dengan adanya program Binwil ini, masyarakat sekitar dapat mengetahui bahkan merasakan langsung eksistensi dan partisipasi PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam membantu dan mendorong pengembangan wilayah, daerah, dan masyarakat.

c. *Community Relations*

Menurut Wilbur J. Peak, *Community Relations* adalah partisipasi suatu organisasi yang berencana, aktif, dan berkesinambungan di dalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan kedua pihak, lembaga, dan komunitas. Hal ini bisa dilakukan melalui prinsip CSR yang berkesinambungan. Sehingga meningkatkan kualitas kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan dari para komunitas dan masyarakat luas. PT. Kalimantan Sawit Kusuma dipandang bukan hanya sebagai sebuah perseroan semata, namun juga sebagai lembaga yang selalu dinanti untuk berkontribusi terhadap pengembangan sosial ekonomi masyarakat, terutama daerah *bufferzone*.

2. Maksud dan Tujuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Maksud dari program CSR yang direncanakan PT. Kalimantan Sawit Kusuma adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 butir 3, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 di mana perusahaan yang melaksanakan kegiatan investasi pembangunan diwajibkan untuk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Disamping itu perusahaan sendiri berkeyakinan dan merasa perlu untuk mengkondisikan masyarakat sekitar kebun dan pabrik memiliki kemandirian dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menjaga eksistensi dan kesinambungan usaha jangka panjang. Dengan demikian tentunya terdapat berbagai masalah yang perlu

dikondisikan sebagai modal dasar tercapainya kebutuhan dasar baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu program CSR yang direncanakan oleh perusahaan untuk periode tahun 2012 merupakan kelanjutan dari program kegiatan periode tahun 2011.

Sedangkan, tujuan dari program CSR adalah memberikan sumbangan pemikiran, pembangunan fisik dan biaya, dan apabila dimungkinkan memberikan alih daya dan atau transformasi berbagai teknologi, peradaban, sesuai dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat dan potensi sumber daya lainnya untuk membantu memecahkan kesulitan masyarakat disekitar Perkebunan dan pabrik kelapa sawit dalam upaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sehat, memiliki kemandirian dalam penataan kehidupan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu diperlukan suatu program yang sinergi dengan pembangunan program pemerintah, sehingga efektifitas program pembangunan akan tercipta keselarasan sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Landasan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma berlandaskan pada :

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4756).
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

- c. Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699)
- d. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pembangunan Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO).

4. Ruang Lingkup Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Ruang lingkup kegiatan program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma periode tahun 2012 merupakan kegiatan lanjutan dari program kegiatan periode Tahun 2011, meliputi: ekonomi produktif, kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana dan prasarana/aksesibilitas, sosial budaya, dan olahraga.

C. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Implementasi *corporate social responsibility* (CSR) PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam” dengan teknik *purposive* terhadap beberapa informan yang terkait dengan implementasi program CSR di PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam, terjaring dengan metode tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Informan Penelitian

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1	Junaidi, SE	S1	Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma
2	Gusti Mutaulina, Amd	D3	Staff Humas PT. Kalimantan Sawit Kusuma
3	Ali Suanto, S.Sos	S1	Kades Jihing
4	Rehapno, Spd. Ak	S1	Kades Balai Riam
5	Kadambi, Amd	D3	Ketua RT. 03 Desa Balai Riam
6	Diharto, Spd	S1	Ketua RW. 01 Desa Air Dua
7	R. Junaidi	SMA	Ketua LSM, LPPM Kab. Sukamara

Sumber : Data primer penelitian Tahun 2013

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan terkait implementasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam, dengan berpedoman pada *interview guide*, maka dapat disajikan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Implementasi Program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam, meliputi : Mekanisme penerapan, Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi serta dampak pelaksanaannya.

a. Mekanisme Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1) Identifikasi

Sarana program *Corporate Social Responsibility* yang direncanakan PT. Kalimantan Sawit Kusuma hasil identifikasi dan observasi di desa-desa yang berdekatan dengan kegiatan oprasional, meliputi: Balai Riam, Desa Jihing, Desa Air Dua, Desa Petarikan , Desa Pempining, Desa Nibung Terjun, Desa Ajang, Pangkalan Muntai, SP I, SP II, SP III, SP IV, dan SP V. Prioritas utama saran adalah bagaimana kegiatan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui perwakilan koperasi Unit Desa masing-masing. Berdasarkan potensi daerah yakni sumber daya lahan yang paling ideal untuk dikembangkan adalah:

- (a) Melalui kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit terintegrasi dengan pabrik kepala sawit yang diperkirakan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki nilai ekonomi tinggi dengan pola

kemitraan usaha baik pola PIR-TRANS KKPA, pola INTI-PLASMA maupun pola bagi hasil.

- (b) Kemudian apabila telah berhasil menciptakan modal dasar secara ekonomi, kemudian yang perlu dikembangkan lebih lanjut di bidang kesehatan masyarakat.
- (c) Selanjutnya setelah kesehatan masyarakat dapat dijangkau oleh masyarakat, kemudian ditingkatkan untuk bidang pendidikan.
- (d) Terakhir direncanakan untuk dikembangkan adalah meningkatkan interaksi sosial antara perusahaan dengan prinsip kebersamaan dalam memecahkan masalah menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, penghormatan terhadap adat istiadat dengan cara memelihara tata cara kehidupan pra leluhur yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan kontekstual, memelihara lingkungan hidup.

2) Sasaran Program Kegiatan

Dengan kondisi masyarakat yang telah dijelaskan di atas, maka PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam merencanakan program CSR memilih sasaran adalah sebagai berikut :

- (a) Bidang Ekonomi, melalui penguatan kelembagaan koperasi dengan pola usaha pertanian, sehingga di harapkan akan dapat: memberikan dampak ekonomi secara signifikan, pembukaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, peningkatan pendapatan,

buhan ekonomi, peningkatan daya beli, dan peningkatan daya saing dalam menghadapi era global yang penuh dengan tantangan. Disamping itu perusahaan akan mendorong *social entrepreneurship* (wirausaha sosial) lokal.

- (b) Bidang kesehatan melalui penyediaan air bersih dan posyandu, sehingga diharapkan dengan sumber penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan akan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Disamping itu dengan adanya poliklinik perusahaan dapat ditingkatkan kerjasama dengan puskesmas kecamatan Balai Riam dalam mengucapayakan berbagai program kegiatan dibidang kesehatan.
- (c) Bidang Pendidikan, melalui penyediaan sarana transportasi bagi siswa dan siswi karena lokasi sekolah cukup jauh dengan tempat tinggalnya, sehingga tidak mungkin untuk ditempuh dengan berjalan kaki diharapkan akan dapat memotivasi siswa untuk tetap konsisten dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Disamping itu kedepan akan mengidentifikasi terhadap anak-anak usia sekolah memiliki kemampuan akan tetapi terkendala biaya pendidikan akan memberikan program bea siswa.
- (d) Bidang sosial, meliputi: (a) pemeliharaan dan peningkatan kerekatan akses komunikasi timbal balik yang seimbang dan setara perusahaan dengan masyarakat setempat, (b) penghormatan terhadap adat istiadat dengan mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan dengan mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan budaya, (c)

kerukunan beragama dengan mendorong toleransi antara agama yang mengutamakan kebersamaan dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (d) Pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana sebagai salah satu aksesibilitas antara komunitas dengan dengan desa lainnya.

PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam merencanakan program CSR memilih sasaran masyarakat yang berlokasi di :

- (a) Desa Balai Riam, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara di bidang kesehatan.
- (b) Desa Jihing, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara di bidang kesehatan.
- (c) Desa Air Dua Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara di bidang kesehatan.
- (d) Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kceubung, Kabupaten Sukamara di bidang sosial budaya.
- (e) Desa Melatup, Kecamatan Permata Kceubung, Kabupaten Sukamara di bidang prasarana jalan/aksesibilitas.
- (f) Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, dan Menengah Atas di bidang kesehatan.

3) Tahapan Program Kegiatan

Perencanaan program CSR dapat dilakukan setelah masalah, populasi, dan kebutuhan dipahami, memperoleh dukungan dan strategi serta takit tersusun. Program CSR yang direncanakan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma adalah menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat atau sarana perubahan. Namun demikian proses bukan merupakan tahapan yang kaku. Dapat dimungkinkan perencanaan program dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman masalah, populasi. Kebutuhan dan diakhiri dengan perumusan strategi dan takit. CSR yang direncanakan perusahaan memadukan kepentingan shareholder dan stakeholder. Oleh karena itu program CSR tidak hanya berfokus pada hasil, akan tetapi pada proses untuk mencapai hasil melalui berbagai langkah/tahapan:

- (a) *Engagment*, yaitu tahapan pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini berupa dialogisasi mengenai rencana program CSR dengan tujuan terbangunnya kesadaran, pemahaman, penerimaan, dan kepercayaan masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Model sosial akan di jadikan kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (b) *Assessment* yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needs-based approach (aspirasi

- masyarakat) mealinkan jugaberpijak pada right-based (standar normatif hak-hak sosial masyarakat).
- (c) *Plan of action*, yakni merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk *stakeholders* dipihak lain.
 - (d) *Action and Facilitation*, menerapkan program bersama. Program dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi local. Namun bisa pula difasilitasi oleh pihak perusahaan. *Monitoring supervise* dan pendamping merupakan salah satu kunci dari implementasi program.
 - (e) *Evaluation and termination or reformation*, adalah menilai sejauh mana keberhasilan Implementasi program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi ternyata cukup berhasil, progam perlu diakhiri (*termination*) yakni perlunya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang erlibat. Akan tatapi apabila aan dilanjut (*reformation*) maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru dapat dirumuskan sepanjang diperlukan.

4) Jenis Kegiatan, Tata Waktu, dan Alokasi Biaya

Tabel 4.3 Jenis Kegiatan, Tata Waktu, dan Alokasi Biaya Program CSR

No.	Lokasi	Jenis Kegiatan	Jumlah Unit	Tata Waktu	Alokasi Biaya (Rp)
1	Desa Balai Riam	Sumur Bor	5	Februari 2012	25.000.000
			1	Agustus 2012	50.000.000
2	Desa Jihing	Sumur Bor	3	Maret 2012	15.000.000
			1	September 2012	50.000.000
3	Desa Air Dua	Sumur Bor	3	April 2012	15.000.000
			1	November 2012	50.000.000
4	Desa Nibung	Sosial Budaya	1	Mei 2012	15.000.000
5	Desa Melatup	Perbaikan jalan	4	Oktober 2012	15.000.000
6	Siswa	Transport Masker	12	Jan –Des 2012	42.000.000
			1000	Juli 2012	1.000.000
7	Masyarakat	Olah Raga	Rutin	Jan – Des 2012	4.000.000
Jumlah					342.000.000

Sumber : PT. Kalimantan Sawit Kusuma (2013)

Gambar 4.3. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Desa Balai Riam



Gambar 4.4. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Desa Air Dua



Gambar 4.5. Kegiatan Pembangunan posyandu



Gambar 4.6. Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan



Gambar 4.7. Kegiatan Sosial Fasilitasi Dewan Dayak



Gambar 4.8. Kegiatan Sosial Olah Raga



2. Faktor Yang mempengaruhi Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Komunikasi

Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran. Dalam faktor komunikasi ini akan dilihat beberapa fenomena yang diamati peneliti dilapangan terkait implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam.

Dalam rangka mengkomunikasi implementasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam, hal ini dapat di lihat dari sebagai berikut :

1) **Intensitas sosialisasi**

Berkaitan dengan ada tidaknya dan frekuensi sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang sama dari informan, hal ini seperti yang sampaikan oleh Junaidi, SE selaku Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma , bahwa :

“Intensitas komunikasi CSR masih perlu di benahi yang dilakukan melalui identifikasi dan observasi lapangan untuk melihat kondisi yang, sebenarnya dan atau menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan program kegiatan”

Hal senada disampaikan oleh Gusti Mutaolina, Amd, selaku staff Humas PT. Kalimantan Sawit Kusuma, bahwa :

“Sosialisasi yang dilaksanakan sebelum Implementasi CSR oleh pihak perusahaan kepada masyarakat atau desa di sekitar perusahaan PT. Kalimantan Sawit Kusuma masih perlu media sosialisasi yang memadai karena tingkat pemahaman masyarakat yang rendah”

Hal ini di tambahkan dari hasil wawancara peneliti dengan penerima kebijakan diperoleh keterangan dari informan sebagaimana yang disampaikan oleh Rehapno, Spd. AK selaku Kades Desa Balai Riam, bahwa :

“Benar adanya bahwa sosialisasi CSR dan intensitas sosialisasi CSR di desa Balai Riam dilakukan oleh perusahaan, namun kami dari sosialisasi program yang ditawarkan oleh pihak perusahaan belum sepenuhnya mengakomodir keinginan masyarakat”

Berdasarkan hasil tersebut, bahwa intensitas sosialisasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma masih perlu peningkatan secara persuasip agar perencanaan dari pihak perusahaan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaannya.

2) Kejelasan sosialisasi program CSR kepada masyarakat

Kejelasan sosialisasi program CSR baik tentang materi program maupun tempat dan waktu pelaksanaan bahkan pembiayaannya kepada masyarakat telah diupayakan semaksimal mungkin oleh pihak perusahaan, sebagaimana diungkapkan oleh Junaidi, SE selaku Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma, bahwa :

“Sosialisasi program CSR telah dilakukan secara utuh dan komprehensif sebagaimana standar landasan pelaksanaannya, yang bertujuan agar masyarakat memahami apa yang menjadi perencanaan kami, namun masyarakat pemahaman masyarakat tentang program sangat berbeda”

Hal senada disampaikan oleh Kedambi selaku Ketua RT.03 Desa Balai Riam, bahwa :

“pada saat sosialisasi program CSR oleh pihak perusahaan masih terdapat masyarakat yang belum memahami dikarena tingkat kehadiran dalam sosialisasi program CSR masih rendah, sehingga terjadi perbedaan persepsi antara program yang ditawarkan dengan keinginan masyarakat”

Berdasarkan hasil tersebut, bahwa kejelasan sosialisasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma kepada masyarakat perlu mempergunakan pola dan metode yang berbeda dalam upaya menyampaikan program-program CSR agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

b. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan Struktur birokrasi pelaksana. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP). SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami karena SOP menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur birokrasi harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Dalam hal Struktur birokrasi implementasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam, yang telah ada pihak informan dalam hal ini memberikan tanggapan sebagaimana dapat di lihat dari sebagai berikut :

1) Pembentukan Struktur Birokrasi

Pembentukan Struktur birokrasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam, sebagai mana peneliti menghimpun wawancara dari Kepala Desa Jihing Kecamatan Balai Riam Ali Suanto, S.Sos, bahwa :

“Secara struktural organisasi dengan peran dan fungsi masing-masing komponen cukup baik walaupun demikian terkadang dengan penggantian pimpinan yang membidangi CSR dapat berdampak kelancaran program tersebut dikarenakan jika pemimpin baru perlu waktu kembali untuk mempelajari dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat ”

Lebih lanjut hal senada ditegaskan pula oleh R. Junaidi Ketua LSM Lembaga Pemantauan Sumber daya Masyarakat mengatakan tentang sistematika pemrogram dan Implementasi CSR dari pihak perusahaan di tambah kan, bahwa :

“Struktur birokrasi pemrograman pelaksanaan CSR sudah cukup tertata bagus dan sudah cukup terintegrasi dalam hirarki garis komando dan garis perintah secara jelas dan teratur sehingga bisa berjalan dengan cukup baik walaupun terkadang memang masih perlu penyesuaian kembali jika kepemimpinan yang membidangi CSR atau di atasnya mengalami pergantian”

Berdasarkan hasil tersebut bahwa pembentukan Struktur birokrasi Implementasi program CSR PT Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam telah dibuat dan tertata dengan baik, sebagaimana di sampaikan dan dijelaskan oleh informan di atas.

2) Pembagian Tugas

Program CSR dari PT. Kalimantan Sawit Kusuma Kecamatan Balai Riam dilihat dari faktor pembagian tugas dan wewenangnya, peneliti menghimpun sebagai mana terungkap dari Junaidi, SE selaku Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma menjelaskan bahwa :

“Mekanisme pembagian tugas dalam implementasi program sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP), yang baik dengan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh petugas pelaksana dari pihak perusahaan”

Demikian pula di tambah dari informasi Diharjo, Spd selaku Ketua RW

01 Desa Air Dua Kecamatan Balai Riam mengatakan, bahwa :

“Apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala dan masalah dalam Implementasi program CSR, tindakan lebih lanjut secara pembagian tugasnya pihak perusahaan segera melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat untuk dimusyawarahkan secara bersama”

Berdasarkan hasil tersebut bahwa Struktur birokrasi Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam hingga tingkat pemerintahan Desa telah dibuat dan tertata dengan baik, sebagaimana di sampaikan dan dijelaskan oleh informan di atas.

c. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisiten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Dalam hal sumber daya pendukung implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam, para informan mempunyai tanggapan yang beragam dengan pengarahannya secara umum adalah perlu peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber

daya lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian ini sebagai berikut :

Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam tidak terlepas dari peran serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakannya, yang sebagaimana terkait hal tersebut di sampaikan oleh Junaidi, SE Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma bahwa :

“ Kondisi perusahaan dengan personalia yang terbatas dan memiliki tugas dan fungsi yang ganda dengan ketersediaan staf yang memiliki pengetahuan program CSR yang minim ditambah lagi dengan kondisi luas wilayah kecamatan Balai Riam yang luas sangat-sangat diperlukan personalia yang memadai untuk pencapaian program CSR yang sangat baik”

Peneliti juga mendapatkan dari wawancara R. Junaidi Ketua LSM Lembaga Pemantauan Sumber daya Masyarakat tentang Kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada Implementasi CSR , bahwa :

“Sumber daya manusia manusia faktor yang penting dalam pencapaian program dan tujuan, untuk saat ini sumberdaya manusia yang membidangi CSR di perusahaan PT. Kalimantan Sawit Kusuma masih minim, hal ini terkait dengan rekrutmen staf masih kepada arah peningkatan produktifitas perusahaan, karenanya diperlukan tenaga personalia yang berlatar belakang pendidikan khusus ilmu sosial kemasyarakatan dalam menunjang dan peningkatan program CSR”

Berdasarkan hasil tersebut bahwa Sumber daya Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam sebagai penggerak Implementasi program CSR sudah mencukupi namaun perlu adanya peningkatan baik kuantitas maupun kualitas personalia sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat demi tercapainya kelerasan rencana dan pelaksanaan.

Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dalam penunangan Implementasi program CSR dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan terkait program CSR tersebut.

d. Disposisi

Disposisi, yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan.

Terkait Implementasi program CSR dalam karakteristik kejujuran, komitmen dan demokratis, peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari wawancara dengan informan Junaidi, SE selaku Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma, bahwa :

“Implementasi program CSR dalam hal konsistensi terkait pelaksanaannya tetap berpedoman pada Prosedur Standar CSR Nomor : PBD/KSK/03 untuk menjaga konsistensi instruksional baik administrasi, prosedur oprasional, petunjuk oprasional yang telah ditetapkan”

Demikian pula di ungkap oleh R. Junaidi selaku ketua LSM Lembaga Pemantauan Sumberdaya Masyarakat (LPPM), bahwa :

“Dalam hal pelaksanaan program CSR oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma hendaknya perlu landasan yang lebih jelas di kalangan perusahaan, hal ini terkait dampak sosial dan lingkungan dari perusahaan sebagai konsistensi terhadap hukum yang berlaku guna keberlanjutan program CSR dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih sejahtera”

Berdasarkan hasil tersebut bahwa disposisi yang sebagai karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis, dalam menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam sudah cukup baik namun perlu adanya peningkatan pelaksanaan sebagai wujud kepedulian pihak perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya.

3) Dampak Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

(a) Pengaruh Program CSR terhadap Aspek Ekonomi

Program CSR di bidang ekonomi mencakup kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan peluang kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan di masyarakat. Bidang ini antara lain meliputi pengembangan koperasi, lembaga keuangan mikro, usaha mikro kecil, industri mikro kecil, teknologi kewirausahaan, pasar dan pemasaran, infrastruktur ekonomi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan.

CSR merupakan bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dimana dengan program CSR yang diimplementasikan oleh PT Kalimantan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Program CSR yang berpotensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal tentulah program yang menjalankan konsep dan teknik implementasi yang berorientasi pada penguatan daya saing ekonomi masyarakat. Program tersebut mendorong inisiatif penguatan ekonomi lokal dengan memperbaiki kondisi lingkungan persaingan usaha, fokus dan sinergis pada perbaikan lingkungan usaha yang mengoptimalkan kelompok industri usaha kecil dalam satu jaringan mata rantai nilai tambah yang terhubung baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis.

Selama ini yang pernah diterima masyarakat di Kecamatan Balai Riam terkait dengan penerapan program CSR oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma yang berorientasi pada aspek ekonomi adalah bantuan modal usaha, peralatan usaha dan pelatihan keterampilan. Dari aspek ekonomi, program CSR yang dilakukan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma telah menghasilkan beberapa elemen pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat memiliki dampak positif bagi perbaikan ekonomi masyarakat, khususnya peserta program, yaitu meliputi:

Pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup masyarakat anggota kelompok di sektor perkebunan kelapa sawit yang mereka peroleh dari pelatihan, praktek, dan pendampingan. Pengetahuan dan keterampilan hidup tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif alternatif bagi keluarga dan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya para pekerja kebun yang melakukan kegiatan

perkebunan kelapa sawit secara mandiri, sejumlah pekerja kebun memproduksi dan menjual minyak goreng, kemudian para pekerja kebun tersebut merintis pembentukan usaha dagang yang memproduksi dan menjual minyak goreng. Menurut para pekerja kebun, usaha produktif tersebut bisa mereka jalankan setelah memiliki keterampilan serta dukungan strategis yang lain seperti modal dan pemasaran.

Kedua, tersedianya modal usaha masyarakat baik yang berasal dari bantuan program (dana bergulir) maupun yang bersumber dari masyarakat sebagai akibat dari pengelolaan dana bergulir. Dengan modal usaha tersebut, beberapa masyarakat anggota kelompok telah berubah statusnya dari semula sebagai buruh orang lain menjadi pemilik usaha sendiri karena memanfaatkan modal usaha tersebut untuk membuka usaha baru. Dengan modal usaha itu pula, para pelaku industri rumah tangga mampu mengembangkan volume usahanya menjadi lebih banyak.

Ketiga, terbentuknya organisasi masyarakat berbentuk kelompok pekerja kebun yang telah dibekali dengan sejumlah pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usaha ekonomi produktif anggotanya. Organisasi-organisasi tersebut telah berfungsi dalam memfasilitasi pengembangan kegiatan ekonomi produktif anggotanya dengan cara menjadi lembaga penjamin bagi anggotanya dalam rangka kerjasama di bidang permodalan dan pemasaran usaha dengan lembaga lain, serta mengelola kredit simpan-pinjam dengan mekanisme tertentu. Organisasi masyarakat tersebut juga menjadi media belajar bersama bagi para anggotanya untuk meningkatkan keterampilan hidup di bidang pertanian dengan mengelola perkebunan kelapa sawit. Melalui kelompok, para anggota kelompok berlatih meningkatkan

keterampilan manajemen usaha kecil melalui pelatihan dan pemberian asistensi manajemen usaha kecil oleh para pendamping dan praktisi.

Keempat, pengembangan kebun kelapa sawit di wilayah operasional PT. Kalimantan Sawit Kusuma sangat besar. Penanaman pohon kelapa sawit dilakukan dalam rangka memanfaatkan lahan kosong dan mengganti kebun kelapa sawit yang tidak produktif lagi menjadi kebun kelapa sawit yang unggul. Kepada para petani kelapa sawit, PT. Kalimantan Sawit Kusuma memberikan bantuan berupa bibit serta pelatihan budidaya dan pasca panen tanaman kelapa sawit serta peningkatan mutu hasil melalui pengelolaan rumah industri kelapa sawit.

Kelima, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didirikan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma untuk menjawab kebutuhan UMKM (Unit Mikro Kecil dan Menengah) dalam mendapatkan akses permodalan. LKM diharapkan mampu menjadi lembaga intermediasi keuangan mikro bagi UMKM, meningkatkan hubungan kerjasama dengan nasabah, pemerintah dan masyarakat, memperkuat SDM dan struktur permodalan LKM. LKM memberikan fasilitas permodalan bagi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) antara lain dalam sektor perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan dan peternakan, dan industri rumah tangga.

Keenam, sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap ekonomi masyarakat, PT. Kalimantan Sawit Kusuma selalu berupaya menyelaraskan kebutuhan dengan daya dukung alam dan potensi yang ada. Interaksi yang sesuai diantara komponen-komponen diharapkan menghasilkan respon saling melengkapi (*complementary*) dan sinergistik sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi

produksi dan memperkuat ekonomi dari sistem perkebunan yang terpadu. Tujuan yang ingin dicapai dari program perkebunan terpadu ini adalah:

- (a) Memberikan contoh bagi masyarakat sekitar dalam pengelolaan perkebunan terpadu,
- (b) Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha,
- (c) Merintis kerjasama dengan para pihak sebagai langkah awal untuk kerjasama dengan masyarakat, dan
- (d) Wahana pembelajaran bagi masyarakat sekitar operasional.

(b) Dampak Program CSR terhadap Aspek Sosial

Program CSR di bidang sosial mencakup serangkaian kegiatan yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan berbagai aspek kehidupan masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, seni budaya, olahraga dan keagamaan. Dalam aspek pendidikan, PT. Kalimantan Sawit Kusuma melakukan kegiatan berupa pemberian kemudahan pendidikan, penyelenggaraan bantuan *training* atau pelatihan, dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Aspek kesehatan, mencakup pemberian kemudahan pengobatan, peningkatan layanan dan infrastruktur kesehatan. Bidang seni dan budaya, meliputi upaya pelestarian seni dan budaya serta peningkatan infrastruktur seni dan budaya. Dalam aspek Olahraga, PT. Kalimantan Sawit Kusuma melakukan kegiatan peningkatan prestasi infrastruktur olahraga, sedangkan dalam aspek Keagamaan, mencakup peningkatan infrastruktur dan kegiatan keagamaan.

Dari aspek sosial, program CSR yang telah dilakukan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma mampu menghasilkan beberapa hal positif, yaitu :

Pertama, meningkatkan sikap dan perasaan saling terikat antar anggota kelompok sebagai satu kesatuan komunitas yang harus saling membantu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat terdapat prinsip-prinsip kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas, keberlanjutan, dan mampu meningkatkan perasaan solidaritas. Sikap dan perasaan saling terikat antar anggota kelompok terbangun oleh kebiasaan berkumpul di dalam kelompok yang terus digalakkan oleh pengurus melalui pertemuan-pertemuan rutin kelompok, serta pertemuan pendampingan teknis oleh pendamping masyarakat.

Kedua, meningkatnya kualitas hubungan antara masyarakat lima desa di sekitar perusahaan yang diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat pelaku program dengan pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma. Kualitas hubungan di antara keduanya antara lain ditandai dengan kesediaan masyarakat menerima perwakilan dari PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam pertemuan-pertemuan rutin kelompok atau pendampingan. Pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma bersedia membiayai usulan program pemberdayaan masyarakat. Sikap PT. Kalimantan Sawit Kusuma tersebut bisa diartikan sebagai bentuk kepercayaan kepada masyarakat. Dengan perkembangan positif dalam interaksi antara masyarakat dengan PT. Kalimantan Sawit Kusuma, berdampak pada menurunnya ketegangan emosional yang sebelumnya kerap terbangun di antara kedua belah pihak. Sejak program CSR mulai dilakukan di

lima desa, para pendamping masyarakat tidak lagi mencatat adanya konflik terbuka antara masyarakat dengan PT. Kalimantan Sawit Kusuma.

(c) Dampak Program CSR terhadap Aspek Lingkungan

Komitmen CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di bidang lingkungan mencakup kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kenyamanan dan kelestarian lingkungan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, PT. Kalimantan Sawit Kusuma selalu melaksanakan program manajemen lingkungan, reboisasi, infrastruktur air bersih dan pengairan, pengendalian polusi udara, air dan tanah, serta lingkungan pemukiman (drainase dan penanganan banjir).

Dari aspek lingkungan, program CSR yang dilakukan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma menghasilkan beberapa hal positif, yaitu :

Pertama, bertambahnya luas lahan kebun yang digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit secara mandiri oleh masyarakat di lima desa. Lahan tersebut sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan yang melibatkan pupuk dan obat-obatan zat kimia secara berlebihan, sehingga selain menambah berat biaya perkebunan, juga berdampak terhadap rusaknya kualitas lahan perkebunan. Perkebunan kelapa sawit dikembangkan lagi oleh program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di aspek teknologi, biaya dan pemasaran.

Kedua, program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di bidang perkebunan kelapa sawit telah berhasil meningkatkan kualitas lahan kebun yang digunakan untuk kegiatan perkebunan. Tanah menjadi subur, lebih lunak, tidak lengket sehingga lebih mudah pengolahannya untuk kegiatan perkebunan. Meningkatnya kualitas lahan perkebunan sebagai akibat dari kegiatan perkebunan yang ramah lingkungan, juga bisa dilihat dari meningkatnya produktifitas perkebunan berupa kelapa sawit.

D. Faktor-Faktor yang menghambat Implementasi CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam

Hambatan yang di hadapi oleh perusahaan PT. Kalimantan Sawit Kusuma tentang implementasi program CSR adalah sebagai mana peneliti berhasil merangkum adalah sebagai berikut bahwa :

1. Faktor Komunikasi

Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam masih mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaannya peneliti mencoba merangkum beberapa wawancara kepada informan terkait faktor komunikasi adalah sebagai berikut :

Terkait faktor komunikasi sebagai penghambat Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam sebagaimana yang terungkap dari Junaidi, S.Sos selaku Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma bahwa :

“Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam dengan luas wilayah yang cukup luas dan dengan sebaran kawasan permukiman yang sangat berjauhan dan dengan tingkat pendidikan serta ekonomi masyarakat yang masih rendah mengakibatkan pola komunikasi kurang intensitasnya, keterbatasan media sebagai sarana komunikasi, keterbatasan pemahaman masyarakat sehingga menjadikan kurang maksimalnya komunikasi sosialisasi program CSR tersebut”

Hal senada di tegaskan pula oleh informan sebagai perwakilan dari pemangku stakeholder Rehapno, Sp.Ak selaku Kepala Desa Balai Riam bahwa :

“Dalam upaya pencapaian program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam umumnya dan khususnya juga di desa Balai Riam memang mengalami beberapa kendala karena kurangnya sosialisasi yang maksimal dengan keterbatasan kondisi masyarakat yang masih belum memahami CSR dan perlunya media sosialisasi yang berbeda agar keinginan masyarakat tentang kerjasama saling mendukung tentang program CSR dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya”

a. Kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat

Sebuah perusahaan dapat bekerja dan memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan jika perusahaan tersebut mendapatkan tempat tertentu dalam lingkungan bisnis maupun lingkungan sosialnya. Kedua lingkungan ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengabaikan lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya memperhatikan lingkungan yang berkaitan langsung dengan bisnisnya tetapi mengabaikan lingkungan masyarakat akan menemui kesulitan non bisnis yang berakibat langsung pada *performance* bisnisnya.

Terdapat 2 (dua) aspek penting yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan, dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Seperti yang diketahui bersama bahwa tanggungjawab sosial perusahaan diimplementasikan kepada seluruh *stakeholders*. Tanggungjawab sosial perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholders*-nya timbul sejak adanya kesadaran akan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang yang ternyata lebih penting daripada peningkatan keuntungan perusahaan semata. Selain mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada *stakeholders*, perusahaan juga diharapkan memiliki perhatian kepada *stakeholders* nya.

Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berijak pada perolehan laba semata, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat.

Menyadari keberadaan suatu perusahaan mempunyai dampak yang signifikan bagi *stakeholdersnya*, maka perusahaan mempunyai kebijakan untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta menyediakan informasi bagi *stakeholders* mengenai hal-hal yang menjadi perhatian *stakeholders*. Pentingnya interaksi antara pihak internal perusahaan PT. Kalimantan Sawit Kusuma dengan pihak eksternal dalam mengimplementasikan program CSR sangat diperlukan sehingga tidak muncul permasalahan atas ketidakjelasan mekanisme hubungan antara unit-unit penyelenggara kegiatan program CSR. Dalam hal ini perlu adanya penyalarsan persepsi antara unit-unit tersebut, bahkan kondisi secara integratif agar dalam penerapannya tidak menimbulkan gesekan dan benturan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya koordinasi yang jelas antar pelaksanaannya, tidak mungkin program CSR yang dicanangkan dapat diimplementasikan dengan baik walaupun dana program tersebut telah dianggarkan.

b. Belum maksimalnya sosialisasi program CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering diterjemahkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan isu yang terus berkembang dalam praktik bisnis. Dewasa ini CSR tumbuh menjadi kecenderungan global, khususnya untuk produk-produk ramah lingkungan yang diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan hak asasi

manusia, terlebih lagi dengan dikeluarkannya Agenda World Summit di Johannesburg tahun 2002 yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost center*), melainkan sebagai sarana laba (*profit center*). Konsep ini merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan apakah sektor swasta atau perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan ekonomi memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya untuk membangun masyarakat lokal.

Tanggung jawab sosial di PT. Kalimantan Sawit Kusuma menekankan untuk berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal tersebut sesuai dengan konsep CSR sebagai berikut:

“The commitment for business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

Dengan kata lain konsep dari CSR adalah komitmen untuk bisnis berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bekerja dengan karyawan dan perwakilan dari masyarakat lokal serta masyarakat pada

umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang baik, baik itu untuk bisnis maupun baik untuk pembangunan.

Dengan demikian, kontribusi perusahaan tidak hanya pada peningkatan aspek keuntungan bagi bisnis perusahaan tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti, PT. Kalimantan Sawit Kusuma tidak hanya mementingkan kepentingan bisnisnya saja namun perusahaan juga mementingkan *stakeholders*-nya yang dianggap lebih penting bagi kemajuan bisnisnya.

Belum tersosialisasikannya program CSR dari PT. Kalimantan Sawit Kusuma kepada masyarakat, menyebabkan program CSR yang dicanangkan belum bergulir sebagaimana mestinya.

c. Kurangnya media sosialisasi tentang program CSR

Pada dasarnya CSR berprinsip pada sebuah siklus yang terdiri dari lima tahapan. Sebagai sebuah siklus, maka seluruh tahapan dalam sistem harus terus berputar dan ditingkatkan secara terus menerus sehingga tercipta sebuah proses perbaikan yang berkelanjutan. Adapun kelima siklus tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Pada tahapan ini perusahaan merumuskan keinginan atau cita-citanya, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Keinginan

atau cita-cita tersebut perlu disusun bersamaan dengan indikatornya agar target rencana dapat terukur. Rencana tersebut akan memberikan arah dan pegangan bagi perusahaan agar dapat berlaku dan bertindak konsisten dalam mencapai keinginan tersebut. Salah satu hal terpenting dalam tahapan perencanaan adalah adanya komitmen dari manajemen puncak, yang umumnya dituangkan dalam kebijakan perusahaan terkait dengan CSR.

2) Penerapan

Tahapan berikutnya adalah penerapan, yang pada dasarnya adalah upaya untuk memobilisasi berbagai sumber daya dan prasarana (infrastruktur) untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah dituangkan dalam proses perencanaan. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sistem dan prosedur, serta peralatan merupakan sumber daya terpenting yang harus disiapkan di samping aspek keorganisasian. Dengan sumber daya yang telah disediakan, perusahaan kemudian menjalankan secara konsisten rencana CSR yang telah dibuat tersebut.

3) Pemantauan dan evaluasi

Tahap pemantauan dan evaluasi dimulai dengan mengukur kinerja penerapan CSR, berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Hasil pengukuran kinerja penerapan kemudian dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat.

Evaluasi kemudian dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja sistem dan penerapan CSR. Tindakan perbaikan akan dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian atas pencapaian rencana, dan pada saat yang sama, tindakan pencegahan juga perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut.

4) Pelaporan

Salah satu kecenderungan yang sedang berkembang saat ini adalah berkenaan dengan isu transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Para pemangku kepentingan semakin menuntut perusahaan agar semakin transparan operasionalisasi perusahaan. Transparansi Implementasi CSR juga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Pelaporan CSR adalah salah satu bentuk transparansi perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya.

5) Peningkatan berkelanjutan

Siklus CSR dimulai dengan keterlibatan manajemen puncak perusahaan dan diakhiri pula oleh manajemen puncak, untuk kemudian berputar kembali. Untuk memastikan daur dapat berjalan secara berkelanjutan terhadap sistem. Penanggungjawab sistem CSR harus memberikan masukan kepada manajemen puncak tentang sistem dan kinerja penerapan CSR. Masukan tersebut, terutama yang berasal dari

proses pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen puncak untuk melakukan proses tinjauan manajemen.

Beberapa tahapan tersebut perlu disosialisasikan kepada para stakeholders, sehingga akan mendorong perusahaan menjadi lebih etis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, agar tidak berpengaruh buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Sehingga, pada akhirnya perusahaan akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi, dukungan sinergis dari stakeholders, dan pemeliharaan/pelestarian lingkungan yang menjadi tujuan didirikannya perusahaan. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai penerima program CSR mengakibatkan masyarakat menjadi pasif dan kurangnya partisipasi pada program yang dilaksanakan.

d. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program CSR

Di dalam tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Secara ekonomi keberadaan suatu perusahaan diharapkan akan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar seperti terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan perusahaan atau terselenggaranya kegiatan-kegiatan sosial yang diprakarsai dan difasilitasi oleh perusahaan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat

sekitar perusahaan. Sedangkan tanggungjawab secara hukum, harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan main dalam penyelenggaraan perusahaan yang telah diformulasikan dalam peraturan hukum.

Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Terdapat hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat merupakan pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Perusahaan selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya, juga memerlukan alam untuk sumber daya olahannya dan stakeholder lain untuk mencapai tujuannya. Dengan menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga keuntungan secara sosial.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program CSR khususnya pada program pemberdayaan masyarakat, menjadikan masyarakat mengartikan program pemberdayaan (*community development*) sebagai *community charity*. Hal ini mengakibatkan masyarakat hanya menginginkan keuntungan dari program CSR yang dicanangkan dalam jangka pendek, bukan untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu, kekurangpahaman masyarakat terhadap kegiatan perusahaan, mengakibatkan masyarakat berpikir bahwa perusahaan tidak memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupannya.

2. Faktor Sumber Daya

Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam masih mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaannya peneliti mencoba merangkum beberapa wawancara kepada informan terkait faktor sumber daya adalah ketersediaan sumber daya manusia sebagai berikut :

Terkait faktor ketersediaan sumber daya manusia sebagai penghambat Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam sebagaimana yang terungkap dari Junaidi, S.Sos selaku Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma bahwa :

“Program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam dengan kondisi perusahaan dengan personalia yang terbatas sangat-sangat diperlukan personalia yang memadai dan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai untuk pencapaian program CSR yang sangat baik”

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya, baik sumber daya alam (*natural resources*), maupun sumber daya manusia (*human resources*). Kedua sumber tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Dari kedua aset pokok ini sumber daya manusia dapat dikatakan lebih penting karena pada kenyataannya walaupun sumber daya alam melimpah tanpa adanya kemampuan sumber daya manusia untuk mengolahnya, maka akan sia-sia dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia sendiri memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai faktor pembangunan juga sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Permasalahan tersebut merupakan

hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian karena untuk mencapai pembangunan nasional perlu memobilisir berbagai sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia. Usaha meningkatkan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan syarat untuk tetap eksis dan mampu bersaing di era globalisasi.

Sebuah perusahaan dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan sumber daya manusia yang efektif. Suatu perusahaan tanpa didukung dengan karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi, dan operasionalnya, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan, dan memajukan di masa yang akan datang. Karena itu, diperlukan langkah-langkah manajemen guna lebih menjamin bahwa perusahaan tersedia karyawan yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan, fungsi, pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia perusahaan dari posisi yang diinginkan di masa depan. Sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah perusahaan yang terkait dengan manusia.

Dikarenakan sumber daya manusia merupakan unsur yang penting bagi pencapaian tujuan organisasi, maka pemanfaatan sumber daya manusia sebagai fungsi dari kegiatan personalia secara efektif dan bijak dapat mendukung pencapaian

tujuan perusahaan. Pentingnya sumber daya manusia dalam perusahaan telah menjadi kebutuhan utama, terlebih lagi ketika tantangan yang dirasakan semakin kompleks.

Pada awal terbentuknya departemen CSR di PT. Kalimantan Sawit Kusuma, ketersediaan staf yang memiliki pengetahuan luas mengenai program CSR sangat minim. Hal ini dipicu oleh sistem rekrutmen staf yang tidak menitikberatkan latar belakang pendidikan khususnya ilmu sosial, hal ini dikarenakan program sosial CSR berhubungan langsung dengan masyarakat.

3. Faktor Struktur Birokrasi

Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam masih mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaannya peneliti mencoba merangkum beberapa wawancara kepada informan terkait faktor struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

Terkait faktor ketersediaan sumber daya manusia sebagai penghambat Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam sebagaimana yang terungkap dari Diharto, Spd selaku ketua RW. 01 Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam bahwa :

“Untuk pencapaian program CSR yang baik tidak terlepas dari struktur birokrasi yang terbentuk dan secara sistematis terkoordinasi beberapa terkadang menjadi kendala Implementasi CSR adalah terjadinya penggantian pemimpin, kurangnya monitoring dan evaluasi program serta kurangnya koordinasi antara birokrasi di tingkat kecamatan, Desa hingga Kabupaten”

a. Pergantian kepemimpinan

Salah satu tugas seorang pemimpin perusahaan adalah menjamin agar perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari bagaimana pemimpin tersebut berinteraksi dengan bawahannya. Kepemimpinan menyangkut sebuah proses mempengaruhi sosial dan pengaruh yang sengaja digunakan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan dalam sebuah perusahaan. Dengan kepemimpinan dan bawahan terjalin adanya saling pengertian, mengerti akan tugasnya masing-masing sehingga keduanya dapat berinteraksi dengan baik. Pemimpin dalam memberikan pengarahan, motivasi terhadap bawahannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tepat.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pemimpin perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu, laba (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi dividen kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan multiplier effects yang diharapkan kepada masyarakat. Dengan

memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan berbagai aktivitas serta pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial tersebut diperlukan adanya kepemimpinan yang mengerti tentang CSR. Pergantian pemimpin akan mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan program-program yang telah dirancang. Hal ini dikarenakan pemimpin baru yang menggantikan pemimpin sebelumnya perlu waktu untuk mempelajari tentang program-program CSR yang ada serta pemimpin yang baru perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bahkan dengan adanya kepemimpinan yang baru dapat diikuti dengan pergantian kebijakan sehingga terjadi inkonsistensi kebijakan, termasuk juga kebijakan dalam program CSR.

b. Kurangnya monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melihat, memantau jalannya perusahaan selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Adapun tujuan monitoring adalah untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi, dan permasalahan serta antisipasi dan upaya pemecahannya.

Sedangkan evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi.

Berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan memerlukan peningkatan kinerja pimpinan dan staf perusahaan, baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi maka keberhasilan, dampak, dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh staf profesional, dan didukung dengan instrumen yang baku akan dapat diperlukan data objektif. Data objektif yang dianalisis dengan teknik yang tepat akan didapatkan informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. Sehingga keputusan yang diambil tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kurangnya koordinasi antara struktur birokrasi yang ada di jajaran pemerintahan

Semakin berkembangnya dunia usaha, para pemimpin perusahaan menghadapi tugas yang menantang dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggungjawab. Perusahaan berusaha meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal supaya dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Namun dalam usaha untuk

mencapai keuntungan yang optimal ini perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan yaitu masyarakat setempat dan pemerintah.

Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, yakni mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan lingkungan hidup; mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika; mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah menetapkan peraturan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Munculnya peraturan daerah CSR merupakan bagian dari fenomena implementasi otonomi daerah, namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting diterbitkannya perda CSR, karena wacana yang muncul tidak lepas dari upaya menghimpun dana CSR, bukan pada bagaimana pemerintah mengontrol penerapan CSR perusahaan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, berjalan berkelanjutan, dan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat. Substansi CSR sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, tetapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan

lingkungan dalam operasi bisnisnya dan dalam interaksinya dengan para stakeholders berdasarkan prinsip kesukarelaan.

Dalam pembuatan perda CSR, pihak DPRD maupun pemerintah terkadang tidak memperhatikan pihak yang menjadi objek yang dikenai tanggungjawab perda, yaitu perusahaan. Seharusnya pemerintah memahami konstruksi berpikir perusahaan, karena akan menjadi kontradiktif ketika pada satu sisi daerah berupaya menarik investor untuk menanamkan modalnya, sedangkan di sisi lain akibat terlalu banyaknya aturan, biaya formal maupun informal, malah membuat investor enggan menanamkan investasinya.

Secara teoritis, pemerintah daerah mampu meletakkan prioritas untuk mensinergikan program pengembangan dan program CSR perusahaan. Pemerintah daerah menghimbau perusahaan untuk memberikan dana CSR-nya untuk dimasukkan dalam APBD. Hal tersebut bertentangan dengan hakikat CSR. Hal ini karena, CSR merupakan salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan kembali kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Caranya adalah dengan membangun infrastruktur seperti membangun sekolah, membangun jalan, serta menyalurkan dana kemitraan dengan bunga rendah, mampu memberi pendampingan untuk *give-back* tersebut.

Potensi program tanggung jawab sosial perusahaan yang bekerja di wilayah daerah sangatlah besar. Secara sendiri-sendiri, banyak perusahaan telah melakukan aktivitas sosialnya, baik yang masih bersifat filantropis

maupun yang sudah mengadopsi konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk mempromosikan konsep yang lebih terpadu tersebut di kalangan pembangunan akan semakin besar. Di samping sosialisasi konsep, pemerintah daerah juga memiliki kepentingan untuk mengetahui seberapa besar aktivitas sosial perusahaan, apa saja ragam kegiatan yang dilaksanakan, serta di wilayah mana saja kegiatan tersebut dilaksanakan. Jika pemerintah daerah dapat menghimpun informasi tersebut, maka pemerintah daerah akan mampu menjalankan fungsi koordinasi program tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah administrasinya.

Prioritas utama CSR adalah untuk pemangku kepentingan yang sah. Mereka yang mengetahui dan berinteraksi langsung dengan perusahaan melalui kegiatan CSR akan merasa lebih dekat dengan perusahaan dan berterima kasih. Bentuk rasa terima kasih bisa dalam bentuk tidak bertetangan dengan jalannya operasi perusahaan, menceritakan kepada orang lain atas pengalaman menyenangkan yang dialami, bahkan menjadi pelanggan setia. Dengan demikian, CSR harus ada pengembalian bagi perusahaan.

Berdasarkan alasan di atas, perusahaan memiliki logika berpikir atas kalkulasi sederhana, biaya izin usaha termasuk pajak di Indonesia lumayan besar dan itupun belum menjamin izin tersebut tuntas dari hulu sampai hilir, belum lagi perizinan turunan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Ditambah biaya-biaya informal untuk mempercepat proses

perizinan, jatah pihak-pihak yang berkepentingan, proposal pembangunan masjid, pembangunan sekolah, dan lainnya. Apa jadinya jika ditambha lagi beban perusahaan dengan perda yang mengatur CSR, terlebih substansinya ditekankan pada menghimpun dana CSR perusahaan, bukan bagaimana seharusnya melakukan praktik CSR secara ideal.

Oleh karena itu, kurangnya koordinasi antara struktur birokrasi yang ada di jajaran pemerintah dengan pihak pelaksana CSR dari perusahaan mengakibatkan program-program yang tidak tepat sasaran, saling tumpang tindih, serta tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

4. Faktor Disposisi

Implementasi program CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam masih mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaannya peneliti mencoba merangkum beberapa wawancara kepada informan terkait faktor disposisi tentang konsistinsi landasan yang secara peraturan masih belum ada peraturan yang jelas tentang Implementasi CSR adalah sebagai berikut :

Terkait Implementasi program CSR dalam karakteristik kejujuran, komitmen dan demokratis, peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari wawancara dengan informan Junaidi, SE selaku Kabag CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma, bahwa :

“Implementasi program CSR terkait pelaksanaannya saat ini berpedoman pada Prosedur Standar CSR Nomor : PBD/KSK/03 untuk menjaga konsistensi instruksional baik administrasi, prosedur oprasional, petunjuk oprasional yang

telah ditetapkan walaupun menjadi kendala bahwa masih belum ada peraturan yang jelas tentang Implementasi CSR di kalangan perusahaan”

Di tingkat internasional, CSR muncul karena pihak perusahaan mendapat tekanan dari masyarakat madani terkait dengan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Karena tekanan tersebut, perusahaan mulai melakukan program CSR sebagai respons. Implementasi program CSR biasanya bersifat sukarela dan didorong oleh berbagai standar penilaian internasional antara lain ISO 9001 (sistem manajemen mutu), dan ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan). Standar penilaian yang diannatikan ebrbagai pihak adalah ISO 26000 yaitu pedoman tanggung jawab sosial.

Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan CSR. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada pasal 74 ayat (1) dinyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau keberkaitan dengan sumber daya alam wajib memberikan tanggungjawab sosial dan lingkungan atau CSR.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang terdapat pada pasal UU No. 40 tahun 2007, pasal 74 ayat (1) tersebut terkesan seolah-olah hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, jika dikaji lebih lanjut dengan membaca penjelasan pasal 74 ayat (1) maka akan muncul penafsiran yang lebih luas terhadap subjek yang dikenai kewajiban

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan ,perseroan yang menjalankan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Konsekuensi hukum dari pemberlakuan pasal tersebut yaitu peletakan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial tidak hanya melekat pada perseroan yang core business di bidang sumber daya alam, melainkan juga menjadi kewajiban perseroan yang bisnis intinya bukan pada bidang sumber daya alam atau tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Persoalan yang kemudian muncul pada peraturan tersebut adalah tidak adanya batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum.

Pada pasal 74 ayat (2) dinyatakan bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatuhan dan kewajaran.

Pasal 74 ayat (3) menggariskan, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Seperti yang telah dijabarkan dalam pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk program CSR, serta sanksi yang akan dikenakan bagi perusahaan yang melanggar. Pada ayat (3) di atas hanya dijelaskan penerapan sanksi yang diatur dalam peraturan pemerintah, yang mana peraturan pemerintah tersebut belum ada.

b) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

CSR merupakan pelaksanaan UU No. 23 tahun 1997 yang memiliki tiga asas yaitu asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. CSR didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kewajiban pemerintah dalam mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Peran serta masyarakat adalah kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan antara lain dengan cara: pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Kedua,

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Ketiga, menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan keempat, memberikan saran pendapat, serta menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

c) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pada peraturan ini lebih terperinci daripada peraturan yang lain. Hal ini dikarenakan pada UU No. 19 tahun 2003 telah dijabarkan lebih lanjut tentang Implementasi CSR pada BUMN, yaitu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Kep-236/MBU/2003. Pada peraturan tersebut telah diatur mulai besaran dana hingga tatacara Implementasi CSR di BUMN. Adapun CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

d) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU No. 25 tahun 2007 pada pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Lebih lanjut dijabarkan pada bagian penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Lebih lanjut lagi pada pasal 34 ayat (1) jika penanam modal tidak melakukan kewajiban seperti pada pasal 15 (b) maka undang-undang

memberikan sanksi sebagai berikut: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

e) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Kegiatan pertambangan di Indonesia secara nyata telah membuka dalam mengembangkan wilayah terpencil. Dengan berkembangnya pertumbuhan baru di beberapa wilayah, telah memberikan manfaat dan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan penerimaan negara, dan penyediaan lapangan kerja. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diharapkan menjadi penggerak pembangunan.

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 pada pasal 74, perusahaan bidang pertambangan wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, karena bergerak di bidang sumber daya alam. Adapun pada bidang pertambangan ini, terikat juga dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa pemegang usaha pertambangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini merupakan rincian tentang kewajiban tersebut yang tercantum dalam UU Minerba:

a. Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- i. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

- ii. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - iii. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
 - iv. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - v. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- b. Pasal 106
- Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 107
- Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 108
- i. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - ii. Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- f) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi, dengan

corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah (UU No. 23 tahun 1997, bagian penjelasan).

Adapun menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aspek yang diatur terkait dengan CSR adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan bagi setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan (lingkungan).

g) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

UU No. 22 tahun 2001 pasal 13 ayat (3) huruf p, menyebutkan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan undang-undang tersebut perusahaan yang operasionalnya terkait dengan Minyak dan Gas Bumi baik

pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

- h) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Adapun pada UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, aspek yang diatur terkait CSR adalah tentang perjanjian dan kegiatan yang dilarang.

- i) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Pada UU No. 41 tahun 1999 ini, aspek yang diatur terkait dengan CSR adalah tentang perizinan usaha hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam dan hak-hak masyarakat adat.

- j) UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Adapun aspek yang terkait CSR pada UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini adalah pengelolaan dan pemanfaatan air (lingkungan).

- k) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 ini aspek yang diatur terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

- l) Keputusan Menteri BUMN No. 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan

Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) pada Keputusan Menteri BUMN No. 236 tahun 2003 ini menjelaskan sumber dana program kemitraan berasal dari (a)

penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen); (b) hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional; (c) pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur pihak-pihak yang berhak ikut serta dalam program kemitraan, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- f. Telah melakukan kegiatan minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Namun dengan adanya berbagai undang-undang tersebut di atas, belum ada yang mengatur secara jelas tentang Implementasi program CSR. Jika dilihat dari masih belum jelasnya aturan dalam Implementasi CSR, menimbulkan penafsiran tersendiri tentang program CSR. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing perusahaan yang memiliki program CSR. Program CSR yang terpenting adalah aturan yang

mewajibkan programnya harus berkelanjutan atau *sustainable*. Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar, baik pada perusahaan itu sendiri yang dapat berupa citra perusahaan, maupun para *stakeholders* yang terkait.

Program CSR yang berkelanjutan tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlihat dalam program tersebut sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kingsley Davis dan Wilbert Moore yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat terhadap stratifikasi sosial di mana stratifikasi sosial tersebut dibutuhkan masyarakat demi kelangsungan hidup yang membutuhkan berbagai jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi sosial, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan sulit atau pekerjaan yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal. Agar masyarakat dapat memiliki modal rangsangan untuk merubah stratifikasi, perlu adanya pemberdayaan supaya masyarakat sadar dan bangkit dari keterpurukan. Kondisi tersebut, dapat diatasi dengan program CSR yang bersifat holistik sehingga dapat membangun tingkat kepercayaan dalam diri masyarakat, oleh sebab itu, perlu didukung oleh program CSR yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bab IV, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam, telah berjalan dengan cukup baik dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang masih perlu peningkatan dalam perencanaan hingga pelaksanaannya ini dapat dilihat dari :
 - a. Komunikasi secara intensitas tentang sosialisasi program CSR terus dilakukan dan di tingkatkan, guna mendapat kejelasan sosialisasi implementasi program CSR baik tentang materi program maupun tempat dan waktu.
 - b. Struktur birokrasi implementasi program CSR cukup tertata baik dan terintegrasi, dalam rangka pencapaian mekanisme pembagian tugas dalam implementasi program CSR yang sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP).
 - c. Kemampuan akan sumber daya serta ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakannya program CSR dengan keterbatasannya bisa telah berjalan cukup baik.

- d. Disposisi tentang konsistensi tentang landasan implementasi CSR dalam hal konsistensi terkait pelaksanaannya berpedoman pada Prosedur Standar CSR Nomor : PBD/KSK/03 untuk menjaga konsistensi instruksional baik administrasi, prosedur oprasional, petunjuk operasional yang telah ditetapkan.
2. Implementasi CSR oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam memberikan dampak pada 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. *Aspek pertama* ekonomi, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kompetensi masyarakat di bidang usaha perkebunan, penyediaan modal usaha, dan pembentukan kelembagaan masyarakat. *Aspek kedua* sosial, mampu meningkatkan sikap dan perasaan saling terikat antar anggota kelompok sebagai satu kesatuan komunitas yang harus saling membantu, serta mampu meningkatkan kualitas hubungan masyarakat sekitar perusahaan dengan pihak PT. Kalimantan Sawit Kusuma sehingga menurunkan ketegangan emosional yang sebelumnya kerap muncul di antara kedua belah pihak. *Aspek ketiga* lingkungan, mampu meningkatkan kenyamanan dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan.
3. Implementasi CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kalimantan Sawit Kusuma di Kecamatan Balai Riam masih mengalami kendala beberapa faktor yang menjadi penghambat adalah :
- a. Faktor komunikasi meliputi kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat, belum maksimalnya sosialisasi

implementasi CSR , kurangnya media sosialisasi tentang implementasi CSR dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program CSR,

- b. Faktor Sumber daya, meliputi : ketersediaan sumber daya manusia,
- c. Faktor Stuktur Birokrasi, meliputi; pergantian kepemimpinan, kurangnya monitoring dan evaluasi, dan kurangnya koordinasi antara struktur birokrasi yang ada di jajaran pemerintahan dan
- d. Faktor disposisi meliputi ; masih belum ada peraturan yang jelas tentang pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi program CSR kepada masyarakat, baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun informal.
2. Perlu adanya penambahan personalia secara kuantitas dan kualitas berdasarkan latar pendidikan pendidikan sosial kemasyarakatan.
3. Diharapkan dalam pergantian pimpinan khususnya yang membidangi program CSR yang betul-betul mengerti dan memiliki kapabilitas dalam program CSR itu sendiri sehingga tidak memerlukan adaptasi yang lama terhadap lingkungan, pemerintah dan mayarakat.
4. Perlu adanya regulasi yang jelas sebagai landasan implementasi program CSR.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. S., 1997, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta
- Abdurrahman. 2003. *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar
- Adjie, Habib. 2008. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 27, No. 1. Halaman 68-74
- Ambarini, Nur Sulistyio B. 2010. *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Instrument Hukum Ekonomi di Era Globalisasi*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10, No. 3. Halaman 308-318
- Andjarwati, Anik Lestari dan Budiadi, Setijo. 2008. *Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer Pengaruhnya terhadap Tanggung Jawab Perusahaan pada Lingkungan Sosial*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 1, No. 1. Halaman 1-13
- Anto, M. B. Hendrie dan Astuti, Dwi Retno. 2008. *Persepsi Stakeholder terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility: Kasus pada Bank Syariah di DIY*. Jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen. Vol. 10, No. 1. Halaman 19-30
- Ardana, I Komang. 2008. *Bisnis dan Tanggungjawab Sosial*. Jurnal Sarathi. Vol. 15, No. 2. Halaman 207-215
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azheri, Busyra. 2009. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*. Jurnal Yustika. Vol. 12, No. 1. Halaman 35-46
- Baroroh, Ali. 2008. *Trik-Trik Analisis Statistik dengan SPSS 15*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Budiarto, Eko. 2002. *Metodologi Penelitian Kedokteran: Sebuah Pengantar*. Jakarta: EGC
- Charolinda. 2006. *Pengembangan Konsep Community Development dalam Kerangka Corporate Social Responsibility*. Jurnal Hukum Pembangunan. Vol. 36, No. 1. Halaman 86-106

- Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Harnowo, Tri. 2007. *Regulasi Corporate Social Responsibility sebagai Penjamin Keberlangsungan Kehidupan*. PPH Newsletter: Hukum dan Perkembangannya. No. 71. Halaman 1-9
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- InfoCSR.net. 2011. *CSR Versi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan Versi ISO 26000*, <http://infocsr.net/read/2620/16/11/2011/csr-versi-undang-undang-no.40-tahun02007-dan-versi-iso-26000.html>, diakses tanggal 26 November 2012
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Oktilia, Helly. 2007. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Pemberdayaan Komunitas (Suatu Kajian terhadap Program BUMN dalam Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi)*. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial. Vol. 6, No. 2. Halaman 1395-1414
- Pamungkas, Dian Putri. 2013. *Pengaruh Good Governance (GCG) terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Industri Pertambangan dan Pengalihan (BUMN Persero Terbuka)*. Jurnal Akuntansi UNESA. Vol. 1, No. 2. Halaman 1-23
- Rachman, Nurdizal M., dkk., 2011. *Panduan Lengkap Pelaksanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta
- Schwartz, Mark H. 2011. *Corporate Social Responsibility: An Ethical Approach*. Ontario: Broadview
- Siahaan, Parlaungan Gabriel. 2008. *Peranan Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Responsibility) dalam Pelaksanaan CSR (Corporate Social*

Responsibility) Terhadap Hak Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 10, No. 1. Halaman 37-47

Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Tri Purwanto, Endang. 2012 *Implementasi Audio Visual Integrated System (AVIS) Dalam Ujian SIM pada SATLANTAS POLRESTABES Semarang Tesis*, Semarang: Undip

Wahyuni, Sri. 2004. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian: Perlunya Implementasi "PRA", Pendekatan Kultural dan Struktural*. Jurnal SOCA. Vol. 4, No. 3. Halaman 275-282

Wikipedia. 2012. *Participatory Rural Appraisal*, http://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_rural_appraisal, diakses tanggal 26 November 2012

Wikipedia. 2012. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, diakses tanggal 26 November 2012

Wiwoho, Jamal. 2008. *CSR Ditinjau dari Aspek Sejarah, Falsafah, dan Keuntungan serta Kendalanya*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum: MMH. Vol. 37, No. 2. Halaman 109-115

Wibawa, Samudra, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.

Yuniarlin, Prihati. 2008. *Penerapan Kewajiban Hukum terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Berdasarkan Prinsip Kedermawanan (Philantrophy)*. Jurnal Media Hukum. Vol. 15, No. 1. Halaman 60-74

LAMPIRAN



PEDOMAN INTERVIEW GUIDE
PADA PT KALIMANTAN SAWIT KUSUMA
OLEH PEWAWANCARA : SURDANI

1. IMPLEMENTASI

- a. Program apa saja yang merupakan kegiatan tahun 2011
- b. Apa modal dan tujuan dari program corporate Social Responsibility (CSR)
PT Kalimantan Sawit Kusuma (PT . KSK)
- c. Dalam pelaksanaan CSR Pada PT Kalimantan Sawit Kusuma berdasarkan pada :
Undang-undang No..... atau PERMEN dan PERDA No PERMEN

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT IMPEMNTASI CSR

- a. Komunikasi
 1. Apa saja komunikasi yang merupakan faktor penghambat pelaksanaan CSR pada
PT Kalimantan Sawit Kusuma
 2. Bagaimana Proses Sosialisasi Pelaksanaan Program CSR Pada Kalimantan Sawit Kusuma

B. SUMBER DAYA

1. Bagaimana cara dan sistem perekrutan Sumber daya manusia atau SDM Pada

PT Kalimantan Sawit Kusuma

2. Apakah dalam pemberian upah / insentif berdasarkan UMR atau berdasarkan tingkat

Pendidikan/ keahlianya

3. Apakah penempatan personalia berdasarkan keahlianya dan job dikrection

C. DIPOSISI

1. Bagaimanakah pedoman dalam organisasi PT Kalimantan Sawit Kusuma dalam pelaksanaan program CSR

2. Apakah pelaksanaan program CSR pada PT Kalimantan sawit Kusuma mendapat dukungan dari masyarakat , sebagai tanggung jawab sosial

D. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan program CSR berdasarkan (SOP)

2. Apakah dalam pelaksanaan CSR Pada PT Kalimantan Sawit Kusuma mempunyai

Lembaga khusus atau sudah masuk dalam struktur organisasi PT Kalimantan Sawit

Kusuma.